



UNIVERSITAS PERTAHANAN

**DIPLOMASI PERTAHANAN INDONESIA DI NEGARA KAWASAN
PASIFIK SELATAN TERKAIT INTERNASIONALISASI SEPARATISME
PAPUA GUNA MENJAGA KEDAULATAN INDONESIA**

**FELANI ANGELA ROSALIA HEMATANG
120170103007**

Tesis yang Ditulis untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan dalam Mendapatkan
Gelar Magister Pertahanan

**FAKULTAS STRATEGI PERTAHANAN
PROGRAM STUDI DIPLOMASI PERTAHANAN
UNIVERSITAS PERTAHANAN**

BOGOR

2018

PERNYATAAN ORISIONALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya atau bagian karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan jenjang apapun di suatu Perguruan Tinggi; dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat istilah, frasa, kalimat, paragraf, subbab atau bab dari karya yang pernah ditulis atau diterbitkan; kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam Daftar Pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa terdapat plagiat dalam tesis ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan/undang-undang yang berlaku.

Bogor, Februari 2019



Felani

Felani Angela R.H.

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : Felani Angela Rosalia Hematang
NIM : 120170103007
Program Studi : Diplomasia Pertahanan
Judul Tesis : Diplomasia Pertahanan Indonesia di Negara
Kawasan Pasifik Selatan Terkait Internasionalisasi
Separatisme Papua Guna Menjaga Kedaulatan
Indonesia

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian dari persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister dalam bidang Ilmu Pertahanan pada Program Studi Strategi Perang Semesta, Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing I :

Brigjen TNI Dr. rer.pol. Rodon Pedrason, M.A.


(.....)

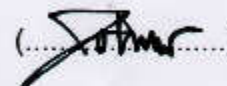
Pembimbing II :

Kolonel Inf. Dr. Bambang Wahyudi, M.Si


(.....)

Penguji I :

Letjen TNI (Purn.) Dr. Yoedhi Swastanto, MBA


(.....)

Penguji II :

Dr. Drs. Sutrimo Sumarlan, M.M., M.Si


(.....)

Penguji III :

Kolonel Laut (E) Dr. Agus Adriyanto, S.T., M.M


(.....)

Ditetapkan di : Bogor

Tanggal : Februari 2019

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kedaulatan adalah target yang ingin dicapai setiap negara dalam kaitannya dengan kepentingan nasional. Seberapa besar negara tersebut dipandang oleh dunia internasional bukan hanya berdasar pada kekuatan material, melainkan kekuatan untuk menyatukan setiap perbedaan bangsa-bangsa yang kemudian dapat berdiri kokoh menjadi negara.¹ Kekuatan ini yang kemudian didasari oleh keharusan dalam menciptakan sistem pertahanan negara yang terpadu dan menyeluruh. Dalam perjalanan sejarah hubungan Internasional, setiap negara memperjuangkan kedaulatan atas negara berawal pada perebutan wilayah yang akhirnya berkembang pada perjuangan mempertahankan konsep negara yang ideal. Konsep negara yang ideal untuk berdaulat adalah didukung oleh adanya warga negara, wilayah, serta diakui oleh negara lain.²

Hal inilah yang tentunya ingin dicapai oleh Indonesia sejak keberhasilan dalam merebut kemerdekaan dari tangan penjajah pada tahun 1945. Sistem pertahanan negara sejak zaman kemerdekaan menganut Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (SISHANKAMRATA), yakni sistem pertahanan secara total dan terpadu serta melibatkan seluruh komponen, bukan hanya dari aktor militer, melainkan juga melibatkan seluruh warga negara.

¹ James L. Hyland, *Democratic Theory: The Philosophical Foundations*, (USA: Manchester University Press, 1995), hlm. 42

² Janice E. Thomson, *State Sovereignty in International Relations: Bridging the Gap Between Theory and Empirical Research* (USA: Wiley, 1995), hlm. 32

Perkembangan zaman tidak merubah persepsi tentang bagaimana pertahanan negara itu harus dibentuk. Sistem pertahanan negara Indonesia yang kini menjadi SISHANTA (Sistem Pertahanan Semesta) merupakan turunan dari konsep pertahanan negara sebelumnya, hanya lebih difokuskan pada sinergitas masyarakat, pemerintah, hingga aparat penegak hukum.³ Sistem pertahanan negara ini dibentuk selaras dengan perkembangan konsep ancaman yang bukan hanya pada skala negara, melainkan setiap warga negara. Konsep ancaman ini yang didefinisikan pada buku putih pertahanan negara terbagi atas ancaman nyata dan ancaman potensial (belum nyata).⁴ Hal ini juga sejalan dengan hakikat ancaman yang dikemukakan oleh Barry Buzan bahwa:

*“Tracing the essence of the state to the social level gives us a major clue about how to approach the idea of national security. If the heart of the state resides in the idea of it held in the minds of the population. Then that idea itself becomes a major object of national security”*⁵

Usaha meningkatkan pertahanan negara dari ancaman merupakan bagian dari kepentingan nasional yang hakikatnya bertumpu pada postur sebuah negara. Hal ini yang kemudian menjadi tantangan bagi Indonesia yang memiliki tujuan sama seperti negara lainnya, yakni memiliki kedaulatan penuh. Sebaliknya, kedaulatan Indonesia belum sepenuhnya tercapai, terutama setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945. Perjuangan Indonesia tidak berhenti sampai disitu. Hal ini terbukti dengan adanya propaganda dalam merebut Irian Jaya yang saat itu masih berada pada kendali Belanda.

Usaha Indonesia dalam merebut Irian Jaya pada tahun 1963 merupakan gerakan pertahanan total untuk mempertahankan kedaulatan negara Indonesia dari penjajah. Usaha merebut kembali Irian Jaya dilakukan dengan sistem perang gerilya, yakni mengerahkan seluruh

³ Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Pasal 1, Ayat (2).

⁴ Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, *Buku Putih Pertahanan Negara Indonesia*, (Jakarta, 2015), hlm. 22

⁵ Barry Buzan, (1983), *People, States, and Fear: The National Security Problem in International Relations* (United Kingdom: Whealsbeaf Books, 1983), hlm.39

kapabilitas militer yang dimiliki Indonesia saat itu. Namun, hal ini tidak sepenuhnya menjamin Irian Jaya atau yang sekarang menjadi Papua untuk mengakui menjadi bagian dari NKRI. Gerakan radikal yang dibentuk atas dasar prinsip ingin memerdekakan Papua dari Indonesia terjadi sejak tahun 1965. Hal ini sebagai akibat dari janji yang dilontarkan oleh Belanda pada saat itu, dan berpengaruh hingga pada ketidakpuasan terhadap PEPERA yang dibuat dimana ada oknum masyarakat Papua yang merasa tidak diikutkan dalam perumusan perjanjian tersebut. Benih-benih separatisme dipupuk dan dikembangkan oleh pemerintah kolonial Belanda sejak awal tahun 1950-an. Belanda saat itu bukan saja mempercepat pembangunan ekonomi dan administrasi di Irian Jaya, tetapi juga melakukan pembangunan politik⁶.

Menurut Nazarudin Syamsudin, upaya Belanda dalam rangka penanaman rasa anti-Indonesia di kalangan masyarakat Irian, yaitu Belanda menempuh tiga cara yaitu:⁷

1. Mengalihkan orientasi dari Indonesia pada wilayah Pasifik, meskipun sebelumnya Belanda telah ikut memperkuat orientasi Irian kepada Nusantara.
2. Berusaha mendekatkan Irian kepada Papua dan Nugini yang dikuasai Australia dengan harapan dapat menggabungkan semuanya dalam suatu negara.
3. Merencanakan suatu negara Papua setelah melalui suatu proses. Dewan Nieuw Guinea yang didirikan oleh Belanda sebagai upaya untuk mendirikan negara boneka Papua, dapat dianggap sebagai "boom waktu" yang sengaja ditinggalkan oleh pemerintah Belanda di Irian Barat. Beberapa tokoh Irian yang pro-Belanda pada saat itu antara lain: Nicolaas Jouwe, P. Torey, Marcus Kaisiepo, Nicolaas Tangahma, dan Elieser Jan Bonay.

Aksi separatisme Papua ini pada perkembangannya telah mencapai ranah sistem internasional, dimana para aktivisnya berpencar ke negara-negara strategis yang dianggap dapat memberi peluang untuk mendukung aksi separatisme tersebut. Usaha internasionalisasi yang

⁶ Saafroedin Bahar dan A.B. Tangdaliling, *Integrasi Nasional: Teori, Masalah, dan Strategi*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1996), hlm. 110.

⁷ Nazarudin Syamsudin, *Integrasi politik di Indonesia*. (Jakarta: PT. Gramedia, 1989), hlm. 108.

dilakukan oleh para aktivis pembebasan Papua tersebut mendapat perhatian dominan dari negara-negara Pasifik Selatan karena posisi geografi hingga persamaan ras. Hal ini telah dilakukan sejak tahun 1982 dimana Dewan Revolusi Organisasi Papua Merdeka (OPM) kembali mengupayakan melalui kampanye diplomasi Internasional. Kegiatan ini dilakukan guna untuk mendapatkan simpati dan pengakuan dari organisasi-organisasi dunia seperti GNB, ASEAN, Forum Pasifik Selatan, bahkan PBB. OPM terbagi antara OPM faksi militer dan OPM faksi politik.

OPM faksi politik dalam berbagai aktivitasnya, terutama dalam usaha mereka mendapat dukungan dari dunia internasional, biasanya menggunakan isu pelanggaran HAM. Sedangkan, peristiwa penyanderaan WNI oleh OPM faksi militer yang terjadi beberapa hari ke belakang adalah salah satu bentuk bentuk pelanggaran HAM yang bertolak belakang dengan konsep perjuangan OPM faksi politik yang selalu menggunakan isu HAM. Organisasi-organisasi OPM faksi politik, dalam usahanya memisahkan Papua dari Indonesia, mencoba menarik dukungan dari berbagai Negara di dunia, termasuk Negara-negara di kawasan Eropa, Asia Pasifik juga Australia.

Sidang Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) di Jenewa, Swiss berlangsung pada 29 Februari hingga 24 Maret 2016. Berbagai isu HAM di berbagai negara anggota PBB disampaikan dalam sidang ini. Salah satunya isu HAM di Papua yang disampaikan oleh delegasi Kepulauan Solomon. Dalam sesi pleno 15 Maret, Barrett Salato, yang menjadi Ketua delegasi Kepulauan Solomon di sidang Dewan HAM PBB, menyampaikan beberapa isu HAM di Papua yang menjadi perhatian bukan saja Kepulauan Solomon, melainkan juga Melanesia Spearhead Groups (MSG) dan Pacific Islands Forum (PIF). Menurut Barrett, indikasi kuat adanya diskriminasi rasial yang terjadi pada Orang Asli Papua (OAP) di tanah mereka sendiri. Kepulauan Solomon dan negara-negara Melanesia, menurut Barrett Salato, juga prihatin dengan populasi OAP yang diperkirakan telah menjadi minoritas di Tanah Papua, sekitar 43 persen

dari total populasi di Provinsi Papua dan Papua Barat. “Kami mendorong pemerintah Indonesia bekerja sama dengan Dewan HAM PBB memprioritaskan akses untuk Pelapor Khusus PBB untuk Kebebasan Berekspresi datang ke Papua,” kata Barrett Salato. Kepulauan Solomon juga mendesak pemerintah Indonesia merespons secara positif permintaan Ketua PIF Peter O’Neill yang juga Perdana Menteri Papua Nugini, untuk mengizinkan misi pencari fakta HAM datang ke Papua guna memastikan adanya dugaan pelanggaran HAM yang terjadi di sana.

Pada tanggal 24 September 2016 polemik mengenai pelanggaran Hak Asasi Manusia di Papua dan Papua Barat kembali dibahas pada sidang majelis umum PBB ke 71. Sekitar 7 negara di Kepulauan Pasifik meminta Dewan HAM PBB memulai penyelidikan yang kredibel dan independen terhadap pelanggaran HAM berat yang terjadi di Papua. Ketujuh negara tersebut adalah Republik Kepulauan Marshall, Kepulauan Solomon, Tuvalu, Republik Vanuatu, Republik Nauru, Tonga, dan Palau. Indonesia melalui diplomat muda Nara merespon tanggapan tersebut dan menyatakan bahwa ketujuh negara Pasifik tidak memahami sejarah, situasi terkini, dan perkembangan HAM di Indonesia yang progresif, pernyataan tersebut juga bersifat politis dan dapat mengganggu ketertiban umum. Dia juga menegaskan bahwa komitmen Indonesia terhadap HAM tidak perlu dipertanyakan lagi karena apa yang telah dilakukan Indonesia sebagai penggagas HAM antar pemerintah Asean, Indonesia juga merupakan anggota pendiri dewan HAM PBB.

Pernyataan yang dilakukan oleh Diplomat Indonesia tersebut tidak meredam aktivitas yang dilakukan oleh penggerak Papua merdeka. Hal ini terbukti berbagai kasus gencatan senjata yang dilakukan masyarakat sipil di Papua, bahkan aksi protes yang dilakukan di KBRI Indonesia di negara-negara besar seperti Inggris dan Australia. Sehingga, berbagai macam cara dilakukan untuk mediasi gerakan para aktivis tersebut. Papua yang merupakan daerah paling timur Indonesia, berbatasan langsung dengan Papua Nugini dan bagian dari Pasifik Selatan. Tentu persamaan ras

terjadi mengingat dominansi ras di Papua adalah dari melanesia. Selain itu, dari potensi geografis kawasan Pasifik Selatan merupakan satu dari sekian banyak kawasan yang membentuk organisasi regional sebagai bentuk kewaspadaan terhadap ancaman serta realisasi kerjasama diantara negara-negara anggota. Wilayah Pasifik Selatan merupakan wilayah yang cukup strategis dalam lingkungan politik Internasional, terlepas dari potensi sumber daya alamnya, negara-negara ini juga diklasifikasi oleh 3 budaya besar yaitu Melanesia, Polinesia, dan Mikronesia. Melanesia merupakan gugusan kepulauan yang memanjang dari Maluku lalu ke timur sampai pasifik bagian barat, serta utara dan timur laut Australia.

Kembali pada dinamika separatisme Papua secara domestik telah mendapat perhatian oleh Pemerintah. Hal ini terbukti melalui pembangunan infrastruktur dan penerapan Otonomi Khusus di Papua. Namun, adanya beberapa spekulasi yang mengasumsikan tingkat keberhasilan pembangunan infrastruktur dan otonomi khusus yang jauh dari level berhasil. Permasalahan separatisme Papua yang cenderung dipolitisasi mengundang beragam opini bahwa bukan hanya faktor ekonomi yang menjadi pendorong. Hal ini terbukti pada beberapa kejadian ketika maraknya pembangunan infrastruktur, para aktivis OPM juga melakukan banyak gencatan senjata dan penyerahan masyarakat yang berdomisili di Papua.⁸

Koordinasi antar lembaga pemerintah Indonesia telah berusaha sejak adanya isu Papua merdeka namun tidak dapat dipungkiri bahwa belum mencapai hasil mutlak pada penghapusan gerakan separatisme tersebut. Bercermin dari pengalaman yang dialami Indonesia mulai dari lepasnya Timor Leste, konflik perpecahan di Aceh oleh GAM, pemberontakan di Maluku oleh RMS, hingga yang masih sering terdengar sampai saat ini adalah gerakan separatisme di Papua. Formasi

⁸ Institute for Policy Analysis of Conflict, "Policy Miscalculations on Papua". *Institute for Policy Analysis of Conflict*, no.40, 2017, hlm. 17

penyampaian pendapat sebagaimana diatur dalam UUD 1945⁹ tidak terlaksana sebagaimana mestinya dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Hal ini yang kemudian sering dimanfaatkan oleh pihak pemberontak yang terus menuntut hak mereka tanpa memikirkan hak masyarakat lainnya.

Bercermin pada usaha Indonesia dalam mempertahankan wilayah kedaulatan tentu membutuhkan strategi dalam konteks diplomasi pertahanan. Sasaran ini kemudian membutuhkan peran aktor-aktor diplomasi pertahanan, yakni Kementerian Pertahanan dan TNI dalam menjaga kestabilan wilayah Indonesia. Tentu saja, kementerian dan lembaga lainnya memiliki andil besar dalam penyelesaian konflik ini. Dengan kata lain, pemerintah tidak hanya bertumpu pada kementerian Luar Negeri dalam konteks diplomasi namun juga mengandalkan peran dari Kementerian Pertahanan dalam konteks diplomasi pertahanan.

Oleh karena itu, peneliti ingin menganalisa bagaimana respon pemerintah Indonesia dalam menyikapi konflik internasionalisasi separatisme Papua. Dengan menjunjung asas kedaulatan, bagaimana langkah Indonesia dalam berdiplomasi dengan negara-negara terkait, khususnya negara-negara Pasifik Selatan dalam menghadapi respon negara-negara tersebut terkait separatisme Papua untuk selanjutnya dapat diaplikasikan dalam bentuk diplomasi total yang sudah dilakukan oleh kementerian Luar negeri terhadap kawasan Pasifik. Usaha internasionalisasi separatisme Papua membutuhkan peran dari setiap aktor dan bukan hanya pemerintah melainkan warga negara juga memiliki andil dalam menangani konflik tersebut. Hal ini juga sebagai pencapaian utama sistem pertahanan negara Indonesia yakni sistem pertahanan Semesta dengan kontribusi total, terpadu, dan berkelanjutan. Sehingga kedaulatan yang dicapai itu bukan hanya dari perspektif politik, namun melihat dari berbagai sisi, serta bagaimana meredam bentuk

⁹ Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 28, Ayat (1).

internasionalisasi yang dikumandangkan oleh para aktivis gerakan Papua merdeka.

1.2 Fokus dan Subfokus Penelitian

Dengan mengangkat judul “**Diplomasi Pertahanan Indonesia di Negara Kawasan pasifik Selatan Terkait Isu Internasionalisasi Separatisme Papua Guna Menjaga Kedaulatan Indonesia**”, maka diperoleh fokus dan subfokus penelitian sebagai berikut:

1.2.1 Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah Diplomasi pertahanan yang dilakukan oleh Indonesia dalam mengatasi isu internasionalisasi separatisme Papua guna menjaga kedaulatan Indonesia.

1.2.2 Subfokus Penelitian

Berdasar pada fokus penelitian yang ditentukan oleh peneliti, maka dibawah ini adalah yang menjadi subfokus penelitian tesis ini.

- a. Perkembangan isu internasionalisasi separatisme Papua yang terjadi pada dunia internasional dan respon dari negara-negara lain, terutama negara-negara kawasan Pasifik Selatan.
- b. Strategi diplomasi pertahanan yang dilakukan Indonesia dalam meredam isu internasionalisasi separatisme Papua dengan negara kawasan Pasifik Selatan.

1.3 Rumusan Masalah

Dari judul tesis “**Diplomasi Pertahanan Indonesia di Negara Kawasan pasifik Selatan Terkait Isu Internasionalisasi Separatisme Papua Guna Menjaga Kedaulatan Indonesia**”, maka diperoleh rumusan masalah yang dijadikan acuan penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah perkembangan isu internasionalisasi separatisme Papua yang terjadi pada dunia internasional dan respon dari

negara-negara lain, terutama negara-negara kawasan Pasifik Selatan?

- b. Bagaimanakah strategi diplomasi pertahanan yang dilakukan Indonesia dalam meredam isu internasionalisasi separatisme Papua dengan negara kawasan Pasifik Selatan?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penulis menyusun tesis ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisa perkembangan isu internasionalisasi separatisme Papua yang terjadi pada dunia internasional dan respon dari negara-negara lain, terutama negara-negara kawasan Pasifik Selatan
- b. Untuk menganalisa strategi diplomasi yang dilakukan Indonesia dalam meredam isu internasionalisasi separatisme Papua dengan negara kawasan Pasifik Selatan?

1.5 Manfaat Penelitian

Tesis yang disusun penulis dengan judul “**Diplomasi Pertahanan Indonesia- Negara Kawasan pasifik Selatan Terkait Internasionalisasi Separatisme Papua Guna Menjaga Kedaulatan Indonesia**” diharapkan dapat memberi manfaat teoretis dan praktis sebagai berikut:

1.5.1 Manfaat Teoretis

Manfaat teoretis yang dapat diperoleh dari tesis ini adalah sebagai berikut:

- a. Memberi pemahaman dalam menganalisa konflik separatisme dengan menggunakan metode penelitian kualitatif berdasar pada analisa triangulasi sebagai pemeriksaan keabsahan data.
- b. Berkontribusi pada diskusi teori-teori ilmu hubungan Internasional dan pertahanan yang kemudian diselaraskan melalui konsep diplomasi pertahanan.

1.5.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang dapat diperoleh dari tesis ini adalah sebagai berikut:

- a. Menganalisa aktualisasi penyelesaian gerakan internasionalisasi separatisme Papua melalui peningkatan kerjasama.
- b. Membantu mencari solusi dalam penyelesaian gerakan separatisme tersebut dengan meningkatkan koordinasi antar aktor, bahkan setiap warga negara sebagai bentuk aplikasi sistem pertahanan negara yang bersifat total dan terpadu.
- c. Dapat menjadi masukan bagi setiap Kementrian dan Lembaga sebagai aktor-aktor yang berperan dalam penyelesaian internasionalisasi separatisme Papua.

BAB II

KAJIAN TEORETIK

2.1 Deskripsi Konseptual

Dalam analisa tesis ini, dibutuhkan landasan teori yang dapat menjadi kajian untuk menganalisa antara fenomena faktual dan teoretika dasar-dasar perumusan analisa masalah yang dikaji tersebut. Dengan judul **Diplomasi Pertahanan Indonesia di Negara Kawasan pasifik Selatan Terkait Isu Internasionalisasi Separatisme Papua Guna Menjaga Kedaulatan Indonesia**, kemudian dianalisa menggunakan beberapa landasan teori serta kajian konsep.

Peneliti menganalisa dengan mengambil teori kepentingan nasional sebagai dasar teori utama. Hal ini bertujuan untuk menguatkan kepAmbali posisi Indonesia yang berjuang untuk mempertahankan Papua sebagai perwujudan kedaulatan Indonesia. Kemudian, dengan menganalisa konsep separatisme sebagai acuan untuk mempelajari rekam jejak Papua yang ingin memerdekakan diri dari Indonesia. Kajian separatisme kemudian dikembangkan dengan konsep internasionalisasi yang didukung oleh kajian *Lost Autonomy*.

Disisi lain, untuk menjawab rumusan masalah isu tersebut, perlu adanya penjabaran konsep strategi sebagai acuan pemerintah untuk menentukan tindakan. Hal ini dijabarkan melalui rumus *Ends, Means, dan Ways*. Konsep diplomasi pertahanan akan menjadi prioritas cara untuk mencapai tujuan dari isu tersebut. Dalam konteks ini, peran diplomasi pertahanan Indonesia yang akan dianalisa melalui pendekatan teori diatas berdasar pada hasil penelitian yang diperoleh peneliti.

Oleh karena itu, ada beberapa teori yang digunakan sebagai pendukung analisa tesis ini sebagai acuan untuk menganalisa tesis yang berjudul **“Diplomasi Pertahanan Indonesia di Negara Kawasan pasifik Selatan Terkait Isu Internasionalisasi Separatisme Papua Guna Menjaga Kedaulatan Indonesia”**.

2.1.1 Kepentingan Nasional (*National Interests*)

Dalam konsep teori yang dikemukakan oleh Hans J, Morgenthau bahwa segala kepentingan nasional adalah bersifat Survival dikaitkan dengan zaman dimana AS bersitegang dengan dengan Eropa yang berdampak pada krisis internasional dengan periode waktu yang lama.¹ Teori ini kemudian berkembang sebagai dampak dari globalisasi, yakni setiap konflik diminimalisir pengadaan perang sebagai solusi konflik tersebut. Sehingga, pengklasifikasian kepentingan nasional kemudian berkembang menjadi vital, major, dan peripheral.²

Dalam konteks kepentingan nasional Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD RI 1945, meliputi kemakmuran Bangsa, Kedaulatan, perdamaian dunia, hingga implementasi nilai-nilai kebangsaan. Keempat kepentingan nasional Indonesia ini kemudian akan dianalisa berdasar pada klasifikasi kepentingan nasional tersebut.

Yang pertama adalah *Survival* yang identik dengan kedaulatan dalam konteks pertahanan dan keamanan negara Indonesia. Usaha mempertahankan kedaulatan bukan merupakan hal yang dapat dilakukan dalam waktu yang singkat. Ditilik dari sejarah, Indonesia telah berusaha mempertahankan kedaulatan sejak zaman memperjuangkan kemerdekaan Indonesia bahkan dengan mengerahkan seluruh kapabilitas militer yang dimiliki Indonesia. Konflik-konflik yang mengancam kedaulatan Indonesia pada masa kini seperti aksi separatisme,

¹ Hans J. Morgenthau, *Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace*, (New York: McGraw Hill, 1961), hlm. 52

² Dennis M. Drew and Donald M. Snow, *Making Twenty-First-Century Strategy* (Maxwell AFB, Atlanta: Air University Press, 2006), hlm.32.

radikalisme, hingga terorisme. Kedua, *Vital* yang diidentikkan dengan kemakmuran setiap warga Indonesia dalam konteks peningkatan taraf hidup melalui pengembangan ekonomi. Ekonomi dianggap vital karena menyangkut kualitas hidup bangsa yang secara langsung menunjukkan kapabilitas negara dalam konteks kekuasaan sehingga kemakmuran tercipta. Indonesia yang pada era global ini mengimplementasikan ekonomi pasar bebas dikondisikan pada Geopolitik Indonesia sendiri. Dengan posisi strategis memungkinkan Indonesia untuk memberdayakan sumber daya nasional dengan berfokus pada keamanan serta pertahanan negara.³

Ketiga, *Major* yakni berfokus pada perdamaian dunia. Indonesia sejak zaman perjuangan dikenal pada sistem internasional karena kemampuan diplomasi oleh para pemimpin negara. Sehingga, diplomasi dilakukan Indonesia hingga saat ini bukan hanya dalam konteks memenuhi kepentingan nasional, namun juga kepentingan bersama yang pada hakikatnya menghindarkan dari perang atau usaha perdamaian secara kohersif. Yang terakhir, adalah *Peripheral* yakni berfokus pada pengamalan nilai-nilai kebangsaan. Hal ini merupakan yang paling terakhir dalam implementasi kepentingan nasional namun menjadi hal fundamental terutama dalam pembentukan karakter Bangsa Indonesia. Dengan menganut Pancasila sebagai ideologi Bangsa Indonesia, pembentukan karakter diutamakan terutama dengan maraknya isu-isu perpecahan bangsa seperti aksi separatisme hingga radikalisasi.

2.1.2 Separatisme dan Internasionalisasi

Separatisme pada dasarnya merupakan gerakan suatu daerah atau wilayah untuk memisahkan diri dari negara asal dan membentuk negara sendiri. Hal ini pun tidak terlepas dari adanya aksi kekerasan atau pemberontakan dari pihak separatis dipicu oleh faktor-faktor yang didominasi oleh isu politik dan ekonomi. Beberapa teori menyatakan

³ Daniel Deudney, "Geopolitics as Theory: Historical Security Materialism". *European Journal of International Relations*, Volume 6(1), 2000, hlm. 79.

bahwa daerah yang didominasi oleh masyarakat berpenghasilan rendah cenderung agresif dalam memisahkan diri dibandingkan dengan daerah yang berpenghasilan lebih tinggi. Hal ini disebabkan oleh adanya kecenderungan oleh daerah miskin bahwa negaranya gagal dalam meningkatkan kemakmuran setiap wilayah. Namun, hal ini tidak dapat dijadikan acuan atau alasan utama penyebab terjadinya aksi separatisme. Alasan lainnya yang tidak kalah kuatnya yakni juga ada kecenderungan pada psikologis manusia di wilayah tersebut yang mengalami trauma akibat kekerasan ataupun merekognisi adanya perbedaan budaya dan ras yang mengklaim pihak mereka berada pada posisi resesif.

Pada teori separatisme, konklusi yang menjadi pemicu pemisahan diri terbagi menjadi beberapa bagian yakni, ekonomi, budaya, politik, serta faktor pendukung lainnya.⁴ Pada faktor ekonomi, daerah yang ingin memisahkan diri terdesak oleh kebutuhan ekonomi yang tinggi serta inkompetensi dalam menghadapi perkembangan ekonomi sehingga memicu kecurigaan terhadap pemerintah bahwa adanya kegagalan yang tercipta. Selain itu, hal ini juga didukung oleh kesenjangan pemerataan pengembangan baik infrastruktur maupun sumber daya manusia. Hal ini yang kemudian memicu adanya gerakan anarkis terhadap kaum pemerintah dalam mewujudkan apa yang menjadi keinginan wilayah tersebut untuk menjadi setara dengan wilayah lainnya. Selain itu, dukungan sumber daya alam yang dimiliki oleh wilayah tersebut tidak didukung dengan kerjasama yang baik antara daerah dan pemerintah pusat. Itu sebabnya kecenderungan tercipta untuk memisahkan diri agar hasil yang didapatkan akan jauh lebih besar untuk daerah tersebut dibandingkan dengan dependensi terhadap pemerintah pusat.

Pada aspek budaya, banyak spekulasi bahwa cultural heterogeneity memicu kesenjangan dan batas-batas budaya yang diciptakan oleh masyarakat itu sendiri. Semakin besar perbedaan tersebut, semakin besar

⁴ David S. Siroky, and John Cuffe, *"Lost Autonomy, Nationalism, and Separatism"*, Comparative Political Studies, Volume 48 (1) 3-34, 2015, hlm 9-10.

munculnya gerakan memisahkan diri. Budaya sebagai bentuk klaim identitas suatu etnis atau ras tertentu yang pada akhirnya mengacu pada pencarian suku atau kelompok lain dengan identitas yang sama. Hal ini memicu adanya pergeseran politik suatu negara terutama jika etnis tersebut bersifat resesif dari keseluruhan etnis, sehingga kecenderungan untuk membentuk negara sendiri berdasar pada identitas budaya akan besar. Hal ini tentu bertentangan dengan apa yang sudah menjadi dasar setiap negara dalam menyatukan keberagaman tersebut. Pada praktikalnya, suatu rancangan negara akan dipengaruhi oleh etnis dominan. Berbicara tentang politik tentu merupakan hal yang sangat kompleks

Di sisi lain, Otonomi adalah kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat semata-mata bukan sebagai pemindahan kekuatan primer melainkan menegaskan bentuk kompromi atas penyerahan wewenang terhadap kekuasaan daerah untuk menentukan arah pemerintahan daerah tersebut. Kebijakan otonomi dalam konteks kekuasaan mengacu pada istilah *self-determination* dimana wewenang yang diberikan untuk memacu daerah otonom agar mampu dalam mengembangkan potensi daerah atau wilayah mereka.⁵ Kenyataannya, hal ini menjadi kontradiktif antara makna dan implementasi kebijakan tersebut.

Dalam teori Lost Autonomy, dikemukakan bahwa aksi separatisme dan kebijakan otonomi sangat berkaitan sehingga memunculkan konsep bahwa dalam sistem tata negara, wilayah-wilayah yang diberikan hak desentralisasi berupa otonomi memicu adanya pergerakan separatisme di wilayah tersebut. Mengapa demikian? Selama ini konsep pemerintah pusat yang memegang kunci dalam pemberian wewenang otonomi kepada daerah adalah berdasar pada pengembangan ekonomi dan politik di wilayah tersebut. Faktanya, konsep otonomi bukan hanya berdasar

⁵ Ibid, hlm 6-9.

pada hal-hal yang bersifat pembangunan fisik melainkan psikis dari setiap individu atau warga negara yang merupakan penduduk suku asli.

Puncak kemungkinan terbesar yang timbul dari separatisme dan “*Lost Autonomy*” adalah peluang isu tersebut untuk diinternasionalisasikan. Istilah internasionalisasi didefinisikan sebagai interaksi atau keterkaitan antara 2 atau lebih negara dalam cakupan global.⁶ Isu internal dalam suatu negara atau kelompok diinternasionalisasikan melalui peran para pemberontak atau kontra nasionalisme dalam negara tersebut. Negara-negara yang pada umumnya menjadi tempat mencari dukungan merupakan negara maju ataupun keterkaitan dalam aspek tertentu. Sehingga, potensi untuk mengembangkan isu tersebut menjadi luas dan mendapat perhatian pada kalangan global.

Namun, konteks internasionalisasi tidak hanya mengacu pada definisi konflik. Proses internasionalisasi tetap mengakui legitimasi dari negara tersebut dengan konsiderasi bahwa isu atau konflik terkait memiliki kepentingan tersendiri dalam penyelesaiannya. Pernyataan tersebut mengarah pada rancunya pengakuan kedaulatan atas suatu negara, serta memicu ketegangan domestik dan kesenjangan internasional di antara negara-negara terkait.

Isu yang diinternasionalisasikan pada dasarnya merupakan perkembangan konflik perang dingin. Isu tersebut berkaitan erat dengan konflik etnis domestik dan kemudian mendapat intervensi dari negara atau pihak lain. Pada masa perang dingin, isu internasionalisasi banyak terjadi terutama di Uni Soviet. Para peneliti Uni Soviet kala itu tidak menyebut dengan istilah internasionalisasi melainkan dengan sebutan “*External Intervention in Internal Conflicts*”⁷ Isu etnis merupakan salah satu isu non-

⁶ Held, McGraw, at.al. “*Globalization/ Anti Globalization: Beyond the Great Divide*”, Second edition, (UK: Cambridge, 1999), hlm. 16.

⁷Najafov. Z., “*Internationalization of Ethnic Conflicts and Impact on Regional and International Security*”, *Journal of Political Sciences and Public Affairs*, 2017, hlm 1.

tradisional yang menjadi perhatian internasional, terutama menyangkut Hak Asasi Manusia.

Kasus-kasus pelanggaran HAM seperti genosida, *Human Trafficking*, hingga terorisme merupakan jenis-jenis kejahatan yang tidak hanya berdampak pada area domestik, tetapi akan mempengaruhi sistem pertahanan secara internasional. Di sisi lain, proses internasionalisasi juga memiliki banyak pertimbangan bagi daerah yang mengumandangkan aksi separatisme, yakni "*In contemporary literature in the study of internationalized domestic conflicts wide attention is paid to these issues: motives of foreign intervention for ethnic conflicts, actors, forms and their consequences on the international system and so on.*"⁸

2.1.3 Diplomasi Pertahanan

Diplomasi pertahanan pada dasarnya merupakan konsep yang menggambarkan strategi suatu negara dalam mencapai kepentingan nasionalnya mengenai keamanan dan pertahanan nasional. Di Eropa pada tahun 1998, melalui *Strategic Defence Review*, merupakan awal bagi kehadiran konsep diplomasi pertahanan baik dalam ruang lingkup politik internasional maupun militer. Kemudian Inggris menjadi negara pelopor utama yang mengawali perancangan dan pengaplikasian konsep tersebut. Pada saat yang bersamaan, diplomasi pertahanan ditujukan untuk mengintegrasikan instrumen militer dan praktek diplomatik suatu negara terkait pencegahan konflik, mengelola krisis, dan potensi perselisihan dengan negara lain.

Secara umum terdapat beberapa definisi dari diplomasi pertahanan, Rajeswari Pillai Rajagopalan dalam jurnalnya yang berjudul "*Military Diplomacy: The Need for India to Effectively Use In Its Conduct of Diplomacy*" mendefinisikan diplomasi pertahanan sebagai "*categorized under such heads as defence exchanges to include*

⁸ Najafov. Z., "*Internationalization of Ethnic Conflicts and Impact on Regional and International Security*", *Journal of Political Sciences and Public Affairs*, 2017, hlm 1.

joint training with the militaries of foreign countries".⁹ Sedangkan Matsuda Yasuhiro dalam esai yang berjudul "*An Essay on China's Military Diplomatic: Examination of Intentions in Foreign Strategy*" mengartikan diplomasi pertahanan sebagai, "*all diplomatic activities relating to national security and military diplomatic activities.*"

Dari definisi singkat di atas dapat dipahami bahwa diplomasi pertahanan merupakan konsep yang di dalamnya tercakup strategi negara dalam memenuhi kepentingan pertahanan negara ketika menyikapi serta merespon dinamika lingkungan strategis yang berkembang. Wolfgang menjelaskan bahwa terdapat beberapa tujuan dalam diplomasi pertahanan diantaranya guna mereduksi potensi konflik antar negara (*conflict prevention*), membangun dan menjaga kepercayaan (*mutual understanding*), dan membantu pengadaan alutsista suatu negara (*military assistance*).¹⁰ Pada perkembangannya diplomasi pertahanan mengalami pergeseran makna, melalui penjelasan Andrew Cottey dan Anthony Forster dalam bukunya yang berjudul "*Reshaping Defence Diplomacy: The New Roles for Military Cooperation and Assistance*" menyebutkan bahwa:

*Old defence diplomacy, with its real politic emphasis on countering enemies, and new defence diplomacy, with its emphasis on engagement with potential enemies, support for democracy, good governance, and human rights, and enabling states to deal with their own security problems.*¹¹

Cottey dan Foster sepakat bahwa diperlukan adanya perluasan pengertian dan makna ketika mendefinisikan diplomasi pertahanan di era kontemporer. Definisi sebelumnya yang hanya menekankan pada aspek militeristik menurutnya tidak lagi dapat merepresentasikan secara

⁹ Rajeswari Rajagopalan, "Military Diplomacy: The Need for India to Effectively Use In Its Conduct of Diplomacy, *Library of Congress New Delhi*, 2009, hlm. 63.

¹⁰ Wolfgang Waigner, *Parliamentary Control of Military Mission: Accounting for Pluralism, Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces: Geneva.*, 2006, hlm. 29.

¹¹ A. Cottey and Foster A, *Reshaping Defence Diplomacy: New Roles of Military Cooperation and Assistance*, (Oxford: Oxford University Press, 2004), hlm. 30.

keseluruhan mengenai diplomasi pertahanan. Perluasan tersebut berimplikasi terhadap pergeseran makna mengenai diplomasi pertahanan. Cottey dan Forster melihat bahwa *Military Cooperation and Military Assistance* tetap merupakan komponen fundamental di dalam diplomasi pertahanan, akan tetapi terdapat tambahan poin-poin seperti pada tabel berikut:

Tabel 2.1 Aktivitas Diplomasi Pertahanan

Table 1: Defence diplomacy activities
• Bilateral and multilateral contacts between senior military and civilian defence officials.
• Appointment of defence attaches to foreign countries.
• Bilateral defence cooperation agreements.
• Training of foreign military and civilian defence personnel.
• Provision of expertise and advice on the democratic control of armed forces, defence management and military technical areas.
• Contacts and exchanges between military personnel and units, and ship visits.
• Placement of military or civilian personnel in partner countries' defence ministries or armed forces.
• Deployment of training teams.
• Provision of military equipment and other material aid.
• Bilateral or multilateral military exercises for training purposes.

Sumber: Andrew Cottey dan Foster, 2004

Cottey dan Forster memaknai diplomasi pertahanan sebagai aktifitas yang tidak terlepas militer. Sehingga Cottey dan Forster menawarkan *the new role of defence diplomacy* yang terangkum dalam *strategic engagement, promoting democratic civil-military relations dan developing peacekeeping capabilities*.¹² Karena pada dasarnya, diplomasi pertahanan menggunakan cara-cara damai sebagai interaksinya dalam perubahan lingkungan strategis dan tingkat kebutuhan dari negara tersebut. Sebagai salah satu perkembangan dari unsur diplomasi, diplomasi pertahanan dikembangkan guna mendukung kebijakan luar negeri dalam rangka memperjuangkan kepentingan nasional di berbagai

¹² *Ibid.*

forum internasional. Terkait dengan kebijakan luar negeri suatu negara maka diplomasi pertahanan dilaksanakan tidak hanya melalui kerjasama militer dengan angkatan bersenjata negara-negara sahabat dalam bidang pendidikan, latihan bersama, pertukaran personel. Dalam konteks yang lebih luas, diplomasi pertahanan juga dimaksudkan untuk membangun *mutual understanding* dalam mempersepsikan apa yang dimaksud dengan ancaman melalui beragam konsep seperti *security cooperation*, hingga *security comprehensive*. Selain itu, kepentingan nasional yang dapat dicapai melalui diplomasi pertahanan juga tidak terbatas pada kepentingan dalam aspek militer.

Dalam konsep diplomasi pertahanan untuk internasionalisasi separatisme Papua, hal yang paling signifikan adalah *Strategic Engagement*. Konteks diplomasi yang ingin dicapai adalah bagaimana setiap kepentingan nasional tiap-tiap negara dapat tercapai dan oleh karenanya perlu ada kerjasama yang mengacu pada implementasi strategi yang telah dirumuskan. Konsep *Strategic Engagement* yang dikemukakan oleh Cottey apabila diaplikasikan pada hubungan diplomasi Indonesia-Pasifik Selatan mengacu pada konferensi internasional, kerja sama dalam saling mendukung kebutuhan negara, terutama dengan posisi Indonesia yang menjadi pilar utama ASEAN dan bila dibandingkan dengan negara kawasan Pasifik Selatan yang cenderung lebih kecil dibandingkan Asia.

Selain itu, konsep diplomasi pertahanan juga dikembangkan oleh Gregory Winger yang mengacu pada konteks Power. Menurut Winger, perluasan definisi diplomasi pertahanan patut dilakukan agar konsep militer dan konsep pertahanan secara menyeluruh dapat disinergikan dengan tujuan untuk mencapai kepentingan nasional suatu negara¹³ pada perkembangannya, militer juga menggunakan soft approach dengan prioritas diplomasi karena eskalasi ancaman yang tidak hanya diselesaikan melalui kontak fisik.

¹³ Gregory Winger, "A Theory of Defense Diplomacy", *Vienna: IWM Junior Visiting Fellows' Conferences*, Vol.33, 2014, hal. 23

Kemudian, yang juga menjadi faktor pendukung bahwa diplomasi pertahanan dilakukan melalui soft approach dan militerisasi yang dilakukan melalui kerjasama diperkuat oleh argumen yang dijelaskan oleh See Seng Tan dan Bhubindar Singh pada jurnal yang berjudul "From Boots to Brogues: The Rise of Defense diplomacy in Southeast Asia" menerangkan bahwa diplomasi pertahanan bersifat pragmatis dan transformatif. Bentuk diplomasi pertahanan yang bersifat pragmatis adalah mengkoordinir situasi yang pada hakikatnya eksis diantara dua negara atau kawasan regional dan diplomasi pertahanan yang bersifat transformatif adalah mengubah secara substantif kondisi yang sudah ada. Menurut Tan dan Singh bahwa Asia mendukung mayoritas diplomasi pertahanan yang bersifat pragmatis karena pada dasarnya Asia mendukung perdamaian yang sudah ada dan mengacu pada integritas regional.¹⁴

Papua dalam hal ini yang merupakan bagian dari Indonesia tentu merupakan bagian dari Asia Tenggara. Sehingga, konsep perdamaian dijunjung tinggi dalam proses penyelesaian konflik tersebut. Di sisi lain, suara dukungan gerakan Papua merdeka yang datang dari negara-negara Pasifik Selatan kemudian dianalisa menggunakan konsep diplomasi pertahanan adalah melalui negosiasi dan bagaimana pihak pemerintah Indonesia mampu untuk mengkoordinir kepentingan nasional Indonesia untuk kemudian mendukung negara kawasan Pasifik Selatan dalam pencapaian kepentingan nasional negara-negara tersebut.

Hal ini apabila dikaitkan dengan internasionalisasi separatisme Papua perlu menjadi perhatian utama mengingat pendekatan militer tidak dapat digunakan lagi apabila ingin mencapai kesepakatan. Strategic Engagement yang kemudian disinergikan dengan kerjasama antar aktor akan mengarah pada kapabilitas Indonesia untuk memenangkan hati

¹⁴ Bhubindar Singh, See Seng Tan, "From Boots to Brogues: The Rise of Defence Diplomacy in Southeast Asia", *RSIS Monograph*, No. 21, 2011, hlm. 12.

Papua dan meredam opini pada negara-negara Pasifik Selatan dalam mendukung gerakan Separatisme Papua.

2.1.4 Soft Power

Globalisasi memberikan efek yang luar biasa terhadap seluruh aspek kehidupan manusia termasuk terciptanya interkoneksi global. Fenomena ini, jika merujuk istilah yang dikemukakan oleh James Rosenau, adalah "*Organizational Explosion*" yang berarti bahwa meningkatnya kecenderungan manusia untuk membentuk suatu kelompok dengan visi dan misi yang sama untuk mencapai tujuan.¹⁵ Dari fakta tersebut, maka kerjasama antar kelompok, atau dalam hal ini negara/wilayah suatu negara, menjadi suatu keniscayaan. Namun, perlu diingat bahwa untuk mencapai suatu kesepakatan kerjasama tersebut harus melalui proses panjang. Diperlukan adanya *trust*, *image*, dan yang terpenting adalah kredibilitas kelompok untuk dapat menarik kelompok lain untuk mau bekerja sama. Penggunaan paksaan (*coercive/hard power*) bukanlah langkah yang tepat, terutama pada era globalisasi saat ini, untuk mencapai tujuan. Fakta inilah yang kemudian turut membidani lahirnya konsep *Soft Power*.

Secara singkat, *soft power* dapat didefinisikan sebagai suatu kekuatan untuk mencapai tujuan tanpa menggunakan kekerasan, melainkan menggunakan daya tarik yang dimiliki. Salah satu tokoh penggagas *soft power* adalah Joseph Nye yang ia tulis dalam bukunya "*Soft Power: The Means to Success in World Politics*". Nye menyatakan jika *soft power* adalah kemampuan untuk mempengaruhi, menarik perhatian, membujuk, dan membuat orang lain untuk bertindak sesuai

¹⁵ James Rosenau, *The Study of World Politics: Volume 1*, (New York: Routledge, 2006), hlm.9

dengan keinginan kita tanpa menggunakan paksaan/kekerasan.¹⁶ Dengan definisi tersebut, dapat disimpulkan jika *soft power* merupakan sebuah kekuatan yang konstruktif yang dapat digunakan dalam era globalisasi yang menuntut interkoneksi global. Kekuatan ini juga terbukti ampuh sebagai pondasi awal dalam pencapaian suatu kerjasama antar kelompok.

Dalam konteks yang dikaitkan dengan diplomasi pertahanan, soft power digunakan untuk menghubungkan antar negara dalam konteks yang bersifat lebih terbuka, kooperatif, dan berujung pada hubungan kerjasama. Penekanan militer pun didasarkan pada kapabilitas pertahanan negara, bukan untuk memicu perang.

Tabel 2.2 Types of Power (Jenis-Jenis Kekuatan)

The Types of Power:

Type of Power	Mechanism	Illustration
Hard Power	Coercion	Country B does what Country A wants because Country A would harm B if it does not comply
Economic Power	Incentive	Country B does what Country A wants because Country A will reward Country B for complying
Soft Power	Co-Option	Country B does what Country A wants because B is convinced that what A wants is best.

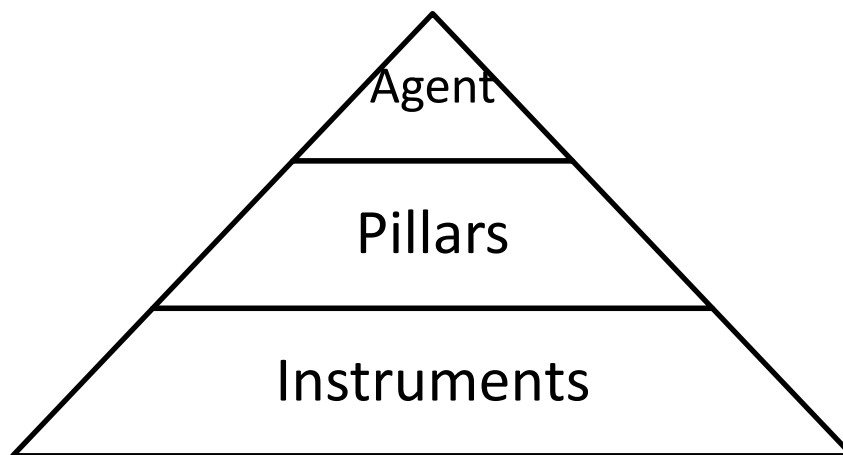
Sumber: Soft Power: The Means to Success in World Politics oleh Joseph S. Nye, 1992

Yang ingin dicapai oleh Indonesia dalam mensinergikan aktor-aktor yang berperan adalah bagaimana kepentingan nasional mereka tercapai dan meredamnya gerakan separatisme sebagai akibat dari bentuk ajakan atau persuasif terhadap negara lain yang dalam konteks ini adalah negara-negara yang berada pada kawasan Pasifik Selatan. Seperti juga yang dikemukakan oleh Morgenthau bahwa:

¹⁶ Joseph Nye, *Soft Power: The Means to Success in World Politics*, (New York: Public Affairs, 1992), hlm. 16

*Produce different agendas that often conflict with one another. In international relations, the ability to get others to do what you want is called power and statecraft is the process through which a country wields power in order to shape the conduct of others in a manner that favors its interests.*¹⁷

Pada hakikatnya, bentuk respon dari power atau pengaruh suatu negara adalah terwujudnya kepentingan nasional, terutama apabila proses perwujudan kepentingan nasional melibatkan relasi dengan negara atau organisasi lain. Implementasi Soft Power berdasar pada paham realisme adalah bagaimana negara tersebut memandang power yang ada ketika berhadapan dengan negara lainnya.¹⁸ Hal ini berlaku pada Indonesia dimana dalam mengimplementasikan power didasari oleh konsep power yang sudah ada untuk kemudian didukung oleh sumber daya dalam meningkatkan soft power.



Gambar 2.1 Soft Power Resources

Sumber: Pengklasifikasian Sumber Daya Soft Power, J. Mearsheimer, 2001

- *Agent*, dalam hal ini adalah aktor-aktor yang berperan dalam mengimplementasikan soft power seperti Pemerintah, masyarakat, organisasi internasional, hingga lembaga non-pemerintah.

¹⁷ Hans J. Morgenthau, *op.cit.*, hlm. 224.

¹⁸ J. Mearsheimer, *The Tragedy of Great Power Politics*, (New York: W.W. Norton, 2001), hlm. 56.

- *Pillar*, dalam hal ini adalah dari aspek apa soft power bisa dimunculkan seperti kebijakan luar negeri, kebudayaan, bisnis, pariwisata, ekonomi, dan bidang lainnya.
- *Instruments*, dalam hal ini adalah dalam bentuk produk apa soft power dapat diimplementasikan. Hal ini biasanya berupa outcome dari solusi selain militer seperti foreign exchange, konferensi, hingga diplomasi budaya.

Dari sumber daya soft power di atas, kemudian dapat diimplementasikan ke dalam berbagai bidang yang bertujuan untuk kemajuan negara dan hubungan diplomasi. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa hal ini membutuhkan kebutuhan finansial yang tidak sedikit sebagai bentuk optimalisasi dukungan terhadap negara-negara yang berelasi. Dalam aspek konflik, faktor finansial sangat dibutuhkan jika ingin mencapai situasi kondusif serta dukungan dari negara-negara lain.¹⁹

2.1.5 Strategi

Pencapaian tersebut tentu membutuhkan konsep strategi yang terpadu serta dapat direalisasikan. Dalam pencapaian strategi tersebut, perlu adanya koordinasi antara strategi militer dan strategi nasional.

“Military strategy is subordinate to national strategy, which is the art and science of developing and using political, economic, military, and informational powers, together with armed force, during peace and war, to secure the objectives of policy.”²⁰

Dalam teori strategi, penyusunan strategi atau langkah-langkah yang disusun demi mencapai suatu kepentingan dibagi dalam tahap *Ends*, *Means*, dan *Ways*. *Ends* merupakan sasaran atau pencapaian yang diharapkan melalui perumusan strategi ini, yang biasa disebut sebagai kepentingan nasional. Kepentingan nasional tersebut yang kemudian memunculkan strategi apa yang harus digunakan untuk mencapai hal

¹⁹ E.J. Wilson, III, “Hard Power, Soft Power, Smart Power”, *The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science*, 2008, hlm. 61.

²⁰ Stephen D. Sklenka, “Strategy, National Interests, and Means to an End”, *US: Strategic Studies Institute*, 2007, hlm. 3.

tersebut. Sedangkan *Means* mengacu pada kapabilitas suatu negara ataupun kelompok, yakni kelebihan yang dimiliki menjadi senjata ataupun media dalam menguatkan strategi tersebut. Hal ini bisa juga berlaku untuk sistem pemerintahan yang kuat serta struktur masyarakat. *Ways* atau cara merupakan langkah nyata yang dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya demi mencapai target suatu negara.

Perumusan strategi untuk mencapai tujuan haruslah diseimbangkan, terutama menyangkut kapasitas yang dimiliki untuk menjadi landasan dalam bertindak. Setiap negara pada umumnya memiliki kapasitas militer yang mampu untuk menjadi landasan dalam mempertahankan wilayah negara. Namun, semakin kuat kapasitas militer yang dimiliki maka akan semakin besar ancaman yang muncul, baik dari dalam negara itu sendiri maupun pengaruh dari luar.

2.2 Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Dalam menunjang analisis tesis ini, peneliti mengumpulkan beberapa penelitian terdahulu dengan fokus yang sama sebagai bahan referensi dan bagaimana tesis ini dapat menjadi hasil analisa yang berkembang serta memberi perspektif baru.

- a. **Dimensi Internasional Kasus Papua** oleh Adriana Elizabeth (Ejournal LIPI, 2005)

Dimensi internasional isu Papua dengan menganalisis peran dan kepentingan beberapa aktor internasional yang terlibat dalam persoalan di Papua. Kemudian langkah atau strategi Pemerintah Indonesia dalam menangani persoalan di Papua, khususnya berkaitan dengan upaya Indonesia untuk menjaga hubungan luar negerinya dengan negara-negara asing maupun komunitas internasional, terutama dengan Australia dan negara-negara Pasifik Selatan.

- b. **Aktivitas Internasional Gerakan Separatisme Papua** oleh Poltak Partogi Nainggolan (Jurnal DPR, 2014)

Aktivitas gerakan separatis Papua terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir, termasuk melalui aksi yang dilakukan di dunia internasional. Temuan penelitian mengungkap semakin aktifnya kegiatan gerakan separatis Papua di fora internasional, dengan berupaya terus mencari kesempatan dan membangun opini dan pengaruh mereka. Pemerintah Indonesia berupaya merespons secara moderat untuk mencapai tujuannya dalam meredam dampak internasional yang diakibatkannya.

- c. **Politisasi dan Internasionalisasi Masalah Papua** oleh Herdiansyah Rahman (Jurnal Intelijen.net, 2016)

Rencana peringatan Hari Proklamasi West Papua jelas merupakan momentum yang dipolitisasi oleh kalangan aktivis Papua terutama yang tergabung dalam Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Parlemenn Rakyat Daerah (PRD), Parlemen Nasional West Papua (PNWP) maupun United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), sedangkan tuntutan ULMWP menjadi anggota MSG adalah contoh internasionalisasi masalah Papua. Perlu digarisbawahi bahwa peringatan kemerdekaan West Papua ataupun keinginan ULMWP menjadi anggota tetap MSG tidak akan pernah terjadi, karena keduanya merupakan "*political yapping*" yang selalu disuarakan oleh kelompok yang pro dengan Gerakan Separatis Papua (GSP) dengan tujuan akhir untuk kepentingan pribadi mereka masing-masing.

- d. **Diplomasi Pertahanan Indonesia Terhadap Negara-Negara di Kawasan Pasifik Papua** oleh Focus Group Discussion Prodi Diplomasi Pertahanan (Universitas Pertahanan, 2018)

Hasil yang didapatkan dari hasil diskusi adalah bentuk diplomasi yang dilakukan Indonesia diakui belum mencapai titik optimal karena pada dasarnya yang masih berperan hanya pada lingkup Kementerian Luar Negeri dan TNI. Itulah sebabnya, perlu ada sinergitas seluruh Kementerian dan Lembaga sebagai aktor

diplomasi pertahanan untuk meredam gerakan separatisme Papua terutama dalam meredam isu tersebut pada negara-negara kawasan Pasifik Selatan sehingga berkurangnya peluang menyuarakan.

Tabel 2.3 Daftar Penelitian Terdahulu Serta Perbandingan dengan Tesis yang Diteliti

No	Peneliti	Judul dan Tahun	Persamaan	Perbedaan
1	Adriana Elizabeth	<p><i>Dimensi Internasional Kasus Papua</i></p> <p>Tahun: 2005 Ejournal LIPI</p>	Membahas sisi separatisme Papua dari sisi internasionalisasi dimana melibatkan beberapa negara yang berperan sebagai aktor internasional baik pro ataupun kontra dengan separatisme Papua	Belum adanya penjabaran diplomasi Indonesia terhadap negara-negara yang terkait dengan isu separatisme Papua, sedangkan tesis ini menganalisa diplomasi yang telah dilakukan Indonesia
2	Poltak Partogi Nainggolan	<p>Aktivitas Internasional Gerakan Separatisme Papua</p> <p>Tahun: 2014 Jurnal DPR Vol. 19</p>	Melacak dan menganalisa gerakan separatisme pada sistem internasional	Pemerintah Indonesia dalam konteks ini hanya difokuskan pada Presiden sebagai kepala negara dan Kementerian Luar Negeri, sedangkan tesis ini juga menekankan posisi Kementerian Pertahanan
3	Herdiansyah Rahman	<p>Politisasi dan Internasionalisasi Masalah Papua</p>	Membahas keterlibatan Indonesia dengan organisasi-organisasi dalam lingkup	tidak membahas lebih lanjut perspektif dari apa yang dilakukan

		Tahun: 2016 Jurnal Intelijen.net	yang membahas separatisme Papua	negara-negara pasifik untuk solusi konflik tersebut dan perkembangan selanjutnya hubungan Indonesia dan negara-negara Kawasan Pasifik Selatan
4	Program Studi Diplomasi Pertahanan Universitas Pertahanan	Diplomasi Pertahanan Indonesia Terhadap Negara-Negara di Kawasan Pasifik Papua Tahun: 2018 Focus Group Discussion	membahas konsep diplomasi yang dilakukan antara Indonesia dan kawasan pasifik Selatan	Tidak adanya bahasan lebih lanjut mengenai kebijakan sinergitas Kementrian dan Lembaga.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Tempat Dan Waktu Penelitian

Untuk menunjang penelitian ini, maka peneliti menentukan tempat yang akan menjadi sumber data serta durasi waktu penelitian.

3.1.1 Tempat Penelitian

Dalam menunjang data yang dibutuhkan untuk menganalisa tesis ini, adapun beberapa tujuan tempat penelitian yang dikunjungi sehingga dapat menunjang analisis, yakni:

- a. Kementerian Luar Negeri
 - Direktorat Asia Pasifik dan Afrika
- b. Kementerian Pertahanan
 - Direktorat Kerjasama Internasional
- c. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia
- d. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
- e. Pengamat Politik (Jurnalis media Indonesia)

3.1.2 Waktu Penelitian

Efektivitas penulisan tesis serta proses penyelesaian diselesaikan dalam kurun waktu beberapa bulan untuk menunjang penyelesaian tesis tepat pada waktunya.

- e. Jurnalis Media Indonesia

3.2.2 Objek Penelitian

Objek penelitian didefinisikan sebagai variabel atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian.² Dalam tesis ini, yang akan menjadi objek penelitian adalah:

- a. Perkembangan internasionalisasi separatisme Papua
- b. Strategi Diplomasi Pertahanan Indonesia terhadap negara-negara kawasan Pasifik Selatan

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Proses analisis data tentu dibutuhkan teknik pengumpulan data yang sesuai dengan metode penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Dibawah ini adalah jenis-jenis teknik pengumpulan data untuk proses pengerjaan tesis ini.

3.3.1 Wawancara

Penelitian ini akan didalami melalui teknik wawancara mendalam dengan melakukan wawancara (*in depth interview*) terhadap informan kunci (*key informan*). Wawancara mendalam merupakan suatu teknik dari penelitian kualitatif yang diartikan sebagai sebuah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai.³ Teknik ini dilakukan oleh seorang pewawancara dengan mewawancarai satu orang secara tatap muka (*face to face*). Hal ini berbeda dengan teknik wawancara biasa yang dapat dilakukan untuk informan bukan informan kunci.

3.3.2 Dokumen dan Studi Literatur

² Arikunto dan Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), hlm. 11.

³ H.B. Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Dasar teori dan Terapannya dalam Penelitian*, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2006), hlm: 72..

Teknik pengumpulan data menggunakan dokumen adalah untuk memperkuat analisa dengan data fisik, yakni terbagi atas dua jenis, yakni dokumen publik dan dokumen rahasia.⁴ Hal ini sebagaimana untuk memperkuat analisis serta perspektif yang lebih luas dalam menarik kesimpulan oleh peneliti dalam tesis ini. Dokumen publik ini dapat berupa tulisan yang dipublikasikan, koran, serta data terbuka di Kementerian, ataupun buku-buku yang terkait dengan tesis yang diteliti. Disatu sisi, Dokumen rahasia dapat berupa data resmi dari pemerintah ataupun surat-surat resmi.

3.4 Pemeriksaan Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif, instrumen utamanya adalah manusia sebagai informan dan *key informan*, oleh karena itu menjadi perlu untuk melakukan pemeriksaan atas keabsahan datanya. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji, *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability*.⁵ Dalam hal ini, untuk menguji kredibilitas data penelitian, peneliti menggunakan teknik triangulasi.

Teknik triangulasi adalah teknik pengujian kredibilitas data dengan melakukan pengecekan melalui penyilangan data sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai waktu.⁶ Kemudian dikembangkan dengan jenis-jenis teknik triangulasi, yakni triangulasi sumber, triangulasi pengumpulan data, dan triangulasi waktu. Hal ini sebagaimana diperkuat untuk memenuhi kriteria data yang dibutuhkan untuk selanjutnya dianalisis sehingga peneliti mendapatkan apa yang diharapkan.⁷

⁴ John W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Method Approaches*. (SAGE Publications, Inc, 2009), hlm. 123.

⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Elfabeta, 2007), hlm. 270.

⁶ William Wiersma, *Research Method in Education: An Introduction*, (Allyn and Bacon Pub., 1986), hlm. 124.

⁷ Sugiyono, *op.cit.*, hlm. 273-274.

- a. Triangulasi sumber, yakni pengujian kredibilitas data dengan mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber untuk selanjutnya dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan.
- b. Triangulasi data, yakni dengan menguji kredibilitas data narasumber satu dengan narasumber lainnya untuk memastikan keabsahan data. Apabila data tidak sesuai, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut baik melalui wawancara ataupun dokumentasi.
- c. Triangulasi waktu, yakni pengujian kredibilitas data pada narasumber berdasar pada waktu yang berbeda. Biasanya, penelitian dilakukan dalam kurun waktu sehari dan hasil wawancara yang didapat pada pagi dan siang hari dapat mempengaruhi kondisi narasumber dan secara otomatis dapat mempengaruhi data yang diberikan. Oleh karena itu, perlu untuk melakukan perbandingan data hingga didapatkan data yang sesuai. Pengambilan informasi dapat dilakukan berulang-ulang apabila data tidak sesuai antara satu dengan yang lainnya.

3.5 Teknik Analisis Data

Pengumpulan data yang kemudian telah diuji keabsahannya akan dianalisis untuk diolah menjadi output yang nantinya merupakan produk dari suatu penelitian. Teknik analisis data diartikan sebagai kegiatan analisis-*analisis* dalam penelitian yang dilakukan dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari instrumen penelitian yang terdiri dari catatan, rekaman, dokumen, tes, dan lain sebagainya.⁸ Dengan penggunaan konsep yang sama, teknik analisis data juga dapat diartikan sebagai proses penelitian yang sangat sukar dilakukan hal ini lantaran membutuhkan kerja keras, fikiran yang kreatif, dan kemampuan pengetahuan yang tinggi, sehingga teknik analisis data tidak bisa

⁸ Moleong dan Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Penerbit PT. Remaja, 2007), hlm. 112.

disamakan antara satu penelitian dengan peneliti lainnya, terutama mengenai metode yang dipergunakan.⁹

Penelitian tesis ini dilakukan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik analisis data dari Miles dan Huberman. Menurut Milles and Huberman, analisis data tertata dalam penelitian kualitatif ditegaskan bahwa kolom pada sebuah matriks tata waktu disusun dengan jangka waktu, dalam susunan tahapan, sehingga dapat dilihat kapan gejala tertentu terjadi. Prinsip dasarnya adalah kronologi. Berikut tahapan dalam analisis data tertata, Pertama, Membangun sajian, pada tahap ini cara yang mudah bergerak maju adalah memecah-mecah inovasi ke dalam komponen komponen atau aspek-aspek khusus, dengan menggunakan ini sebagai baris matriks. Kolom matriks adalah jangka-waktu, dari penggunaan awal sampai penggunaan nanti. Jika terjadi perubahan dalam komponen selama jangka waktu itu, kita dapat memasukkan deskripsi singkat dari perubahan itu. Kedua, Memasukkan data. Pada tahap ini, penganalisis sedang mencari perubahan-perubahan dalam inovasi itu, komponen demi komponen.

Perubahan-perubahan itu dapat ditempatkan dalam catatan-catatan lapangan wawancara dengan para pengguna inovasi yang sudah terkode, yang ditanyai secara khusus apakah mereka telah membuat suatu yang sudah terkode dalam format buku inovasi. Kelanjutan penyelidikan menurut adanya bagian-bagian yang telah ditambah, didrop, diperbaiki, digabungkan, atau diseleksi untuk digunakan. Dalam beberapa hal dapat mengacu pada bukti-bukti dokumenter. Ketiga, Menganalisis data. Pada tahap ini, penganalisis dapat memahami lebih dalam mengenai apa yang terjadi dengan mengacu kembali pada aspek-aspek lain dari catatan lapangan, khususnya apa lagi yang dikatakan orang mengenai perubahan itu atau alasan-alasannya.

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama memasuki lapangan, dan setelah selesai dari

⁹ Sugiyono, *op.cit.*, hlm. 267.

lapangan. Analisis data dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data dalam situs yang dikembangkan oleh Miles Huberman. Data yang sudah terkumpul dibuat dalam matriks. Dalam matriks akan disajikan penggalan-penggalan data deskriptif sekitar peristiwa atau pengalaman tertentu yang menyekat data sebelum dan sesudahnya. Setelah data dimasukkan kedalam matriks selanjutnya di buat daftar cek. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama memasuki lapangan, dan setelah selesai dari lapangan. Analisis data telah dimulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian. Aktivitas dalam analisis data kualitatif harus dilakukan secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.¹⁰

Analisis data dalam penelitian ini dilaksanakan pada saat pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Apabila jawaban yang disampaikan oleh orang yang diwawancarai atau informan setelah dianalisis dirasa kurang memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu sehingga diperoleh data atau informasi yang lebih kredibel. Untuk menyajikan data agar mudah dipahami, maka langkah-langkah analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analysis Interactive Model dari Miles dan Huberman, yang membagi langkah-langkah dalam kegiatan analisis data dengan beberapa bagian yaitu pengumpulan data (data collection), reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (conclusions).¹¹

1. Pengumpulan Data Pada analisis model pertama dilakukan pengumpulan data hasil wawancara, hasil observasi, dan berbagai

¹⁰ Matthew. B. Miles, A. Michael Huberman, Johnny Saldana, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, (Los Angeles: SAGE Publications, 2014), hlm. 273.

¹¹ Ibid., hlm. 169.

dokumen berdasarkan kategorisasi yang sesuai dengan masalah penelitian yang kemudian dikembangkan penajaman data melalui pencarian data selanjutnya.

2. Reduksi Data Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga simpulan final dapat ditarik dan diverifikasi. Reduksi data berlangsung secara terus menerus sepanjang penelitian belum diakhiri. Produk dari reduksi data adalah berupa ringkasan dari catatan lapangan, baik dari catatan awal, perluasan, maupun penambahan.
3. Penyajian Data Sajian data adalah suatu rangkaian organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilakukan. Penyajian data dimaksudkan untuk menemukan pola-pola yang bermakna serta memberikan kemungkinan adanya penarikan simpulan serta memberikan tindakan sajian data berupa narasi kalimat, gambar/skema, jaringan kerja dan tabel sebagai narasinya.
4. Penarikan Kesimpulan Penarikan kesimpulan merupakan bagian dari suatu kegiatan konfigurasi yang utuh. Kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Kesimpulan ditarik semenjak peneliti menyusun pencatatan, polapola, pernyataan-pernyataan, konfigurasi, arahan sebab akibat, dan berbagai proposisi.

Adapun panduan yang dijadikan dalam proses analisis data, dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Dari hasil wawancara, observasi, pencatatan dokumen, dibuat catatan lapangan secara lengkap. Catatan lapangan ini terdiri atas deskripsi dan refleksi.
2. Berdasarkan catatan lapangan, selanjutnya dibuat reduksi data. Reduksi data ini berupa pokok-pokok temuan yang penting.

3. Dari reduksi data kemudian diikuti penyusunan sajian data yang berupa cerita sistematis dengan suntingan peneliti supaya maknanya lebih jelas dipahami. Sajian data ini, dilengkapi dengan faktor pendukung, antara lain metode, skema, bagan, tabel, dan sebagainya.
4. Berdasarkan sajian data tersebut, kemudian dirumuskan kesimpulan sementara.
5. Kesimpulan sementara tersebut senantiasa akan terus berkembang sejalan dengan penemuan data baru dan pemahaman baru, sehingga akan didapat suatu kesimpulan yang mantap dan benar-benar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Demikian seterusnya aktivitas penelitian ini berlangsung, yaitu terjadi, interaksi yang terus menerus antara ketiga komponen analisisnya bersamaan dengan pengumpulan data baru yang dirasakan bisa menghasilkan data yang lengkap sehingga dapat dirumuskan kesimpulan akhir.
6. Dalam merumuskan kesimpulan akhir, agar dapat terhindar dari unsur subjektif, dilakukan upaya:
 - a. Melengkapi data-data kualitatif.
 - b. Mengembangkan "intersubjektivitas", melalui diskusi dengan orang lain.

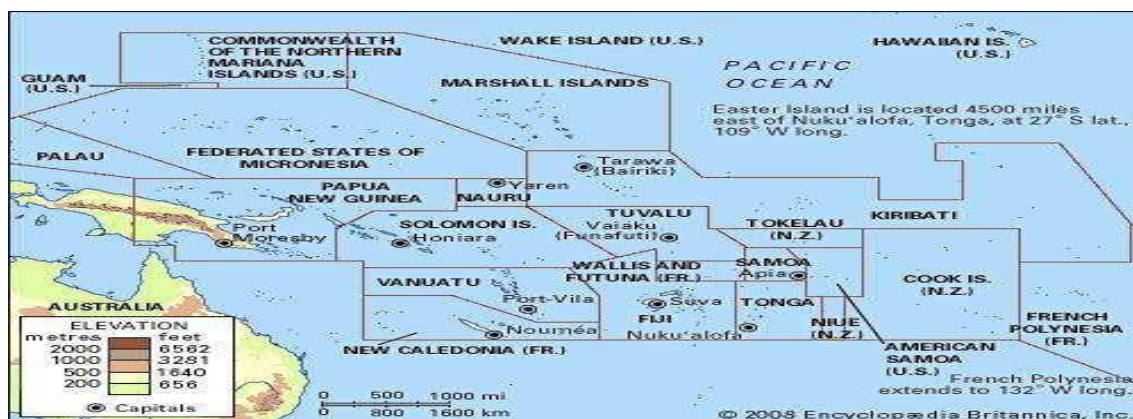
BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Garis besar Penelitian

4.1.1 Negara-Negara Kawasan Pasifik Selatan

Negara-negara Kawasan Pasifik merupakan kawasan yang didominasi oleh perairan sebagai dampak dari luas daratan setiap negara yang tidak terlalu besar. Populasi setiap negara juga dikategorikan sangat sedikit dibandingkan negara-negara pada umumnya. Papua Nugini yang merupakan negara dengan cakupan wilayah lebih luas dibanding negara lainnya hanya berpenduduk 7,6 juta jika dalam skala global masuk dalam kategori yang sangat kecil, namun di antara negara-negara kawasan Pasifik Selatan merupakan jumlah yang besar diikuti Tuvalu.¹ Negara-negara kawasan Pasifik Selatan terbagi atas 3 mayoritas kelompok etnis, yakni Melanesia, Mikronesia, dan Polinesia.²



Gambar 4.1 Peta Negara Kawasan Pasifik Selatan

Sumber: Sophie Foster, Francis James West. "Pacific Islands", dalam <https://www.britannica.com/place/Pacific-Islands>, diakses pada 26 Desember 2018

¹ United Nations Population Fund Pacific Sub Regional Office, "Population and Development profiles: Pacific Island Countries". (UNFPA: Pacific Islands, 2014), hlm.5.

² Sophie Foster, Francis James West. "Pacific Islands", dalam <https://www.britannica.com/place/Pacific-Islands>, diakses pada 26 Desember 2018

Dengan kondisi geografi tersebut, negara-negara Kawasan Pasifik Selatan masuk dalam hitungan negara dengan pendapatan dan sumber daya alam serta manusia yang minim. Meskipun beberapa negara telah diakui sebagai negara merdeka, masih ada beberapa negara seperti Palau dan Kepulauan Marshall masuk dalam negara Federasi Amerika Serikat dan diberi kebebasan mengurus negara mereka. Beberapa negara Kawasan Pasifik Selatan menjadi aktor yang ikut mendukung separatisme Papua dengan mengangkat isu tersebut dalam sidang PBB seperti Papua Nugini, Kepulauan Salomon, Vanuatu, Fiji, dan juga Kaledonia Baru.

Keterlibatan negara-negara Pasifik Selatan dimulai sejak dimunculkannya isu pelanggaran HAM di Papua oleh para aktivis separatis yang kemudian semakin sering dibahas pada forum-forum kawasan regional seperti MSG (Melanesian Spearhead Groups) dan PIF (Pacific Islands Forum). Partisipasi negara-negara Kawasan pasifik Selatan pada awalnya didasari oleh saling memiliki karena adanya persamaan ras yakni ras melanesia antara negara-negara kawasan Pasifik Selatan dengan Papua. Bermula dari ras dan perjalanan sejarah yang semakin menguatkan negara-negara tersebut untuk mendukung Papua agar merdeka dari Indonesia.

Namun, hal tersebut tidak dapat dibenarkan secara hukum karena pada dasarnya Papua resmi menjadi bagian dari Indonesia sejak direbut dari tangan Belanda. Awal mula dibentuk forum regional Melanesian Spearhead group adalah untuk mengembangkan perekonomian serta sharing budaya antara Papua Nugini, Fiji, Kepulauan Salomon, dan Vanuatu. Namun, pada perkembangannya forum ini cenderung membahas tentang isu separatisme di Papua diperkuat dengan para aktivis separatis Papua yang mendatangi negara-negara Pasifik Selatan untuk mencari dukungan internasional dan salah satunya adalah dukungan negara-negara Pasifik Selatan.³ Berikut adalah profil sekilas

³ Anonim. "Diplomasi Indonesia Picu Perang Mulut Antara Fiji dan Kep.Salomon", dalam <https://www.dw.com/id/diplomasi-indonesia-picu-perang-mulut-antara-fiji-dan-kep-salomon/a-43097730>, diakses pada 26 Desember 2018.

negara-negara yang sering diangkat dalam kaitannya dengan isu internasionalisasi separatisme Papua.

1. Fiji

Fiji merupakan salah satu negara Kawasan Pasifik Selatan yang lumayan besar bersama dengan Papua Nugini dan memiliki kapasitas sumber daya manusia yang cukup berkembang dibandingkan dengan negara-negara pasifik lainnya. Namun, dengan perkembangan tersebut tidak cukup untuk meningkatkan jumlah populasi Fiji yang terhitung mencapai 900 ribu jiwa.⁴ Setelah merdeka dari Kerajaan Inggris pada 1970, Fiji berusaha untuk membangun negara mereka dengan Presiden yang tetap dipilih oleh Great Council of Chiefs (GCC).⁵ Namun, pada tahun 2015 Fiji menetapkan negara mereka untuk menjadi negara demokrasi dengan melakukan pemilihan umum Presiden. Presiden terpilih saat itu, Jioji Konousi Konrote merupakan presiden terpilih pertama berdasarkan hasil pemilu. Pada 2018, Fiji kembali melakukan pemilu dan memilih Jioji Konousi Konrote menjadi Presiden terpilih.⁶

Peran Fiji dalam mendukung gerakan separatisme Papua dengan mengajak ULMWP menjadi anggota dalam Melanesian Spearhead Group (MSG) sebagai anggota pada 2014 dan isu kemerdekaan Papua dijadikan salah satu objek politik luar negeri dari organisasi tersebut.⁷ Pada awalnya, hal ini sempat ditolak oleh anggota lainnya dengan dalih MSG merupakan organisasi regional. Namun, pada akhirnya kedatangan aktivis Separatisme Papua mendatangi para petinggi negara Kawasan Pasifik Selatan, yakni Benny Wenda sehingga mereka menyetujui hal tersebut dengan mengangkat solidaritas atas ras melanesia. Kemudian,

⁴ United Nations Population Fund Pacific Sub Regional Office, *op.cit.*, hlm. 22.

⁵ Anonim, "Fiji Country Profile", BBC News, 2018, dalam <https://www.bbc.com/news/world-asia-pacific-14919067>, diakses pada 28 Desember 2018.

⁶ Anonim. "Konrote Reappointed Fiji's President", dalam <https://www.radionz.co.nz/international/pacific-news/365361/konrote-reappointed-fiji-president>, diakses pada 28 Desember 2018.

⁷ Luke Dawes, "The Pointy End for the Melanesian Spearhead Group", The Interpreter, 2018, dalam <https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/pointy-end-melanesian-spearhead-group>, diakses pada 28 Desember 2018.

dengan berkembangnya hubungan bilateral Indonesia dan Fiji yang pada akhirnya membuat Fiji mempengaruhi negara-negara Pasifik Selatan untuk menerima Indonesia sebagai negara anggota yang berujung pada status Indonesia sebagai negara anggota observer.

2. Papua Nugini

Negara Papua Nugini merupakan satu-satunya negara kawasan Pasifik Selatan yang berbatasan langsung melalui daratan dengan Indonesia dan bagian dari Indonesia yang berbatasan dengan negara tersebut adalah Provinsi Papua. Papua Nugini juga tercatat sebagai negara dengan wilayah terbesar di Kawasan Pasifik Selatan dengan luas wilayah 462,840 km². Meskipun diklaim sebagai negara dengan wilayah terluas di kawasan Pasifik Selatan, tidak menjadikan Papua Nugini sebagai negara dengan tingkat kehidupan ekonomi dan sosial yang layak.⁸

Selain itu, wilayah yang luas juga tidak menjamin Papua Nugini untuk memiliki kapabilitas penjagaan wilayah dengan baik. Hal ini terbukti dengan personil militer Papua Nugini yang merupakan gabungan dengan personil militer dari Australia serta mayoritas pertahanan laut dijaga oleh Australia. Di sisi lain, kurangnya sistem pertahanan dari Papua Nugini juga yang memicu banyaknya para aktivis separatisme Papua yang melarikan diri melalui Papua Nugini. Hal ini seperti yang terjadi dengan kasus Benny Wenda yang setelah kabur dari Penjara Abepura kemudian lari menuju Papua Nugini untuk mendapatkan perlindungan di Inggris.

Posisi Papua Nugini terhadap Indonesia bisa dikatakan berada pada posisi tengah. Sebagian jajaran pemerintahan Papua Nugini mendukung keadulatan Indonesia dan Papua adalah bagian dari Indonesia. Namun, beberapa jajaran pemerintah lainnya justru melakukan tindakan sebaliknya dengan tetap mendukung aksi separatisme Papua. Dalam posisi Papua Nugini yang sekarang merupakan ketua MSG

⁸ United Nations Population Fund Pacific Sub Regional Office, *op.cit.*, hlm. 58.

berusaha untuk menunjukkan Indonesia cara agar dapat mempengaruhi jajaran pemimpin dalam organisasi tersebut untuk tidak membahas isu Papua.

3. Vanuatu

Negara Vanuatu dikategorikan sebagai salah satu negara di kawasan Pasifik Selatan dengan tingkat kehidupan ekonomi yang sangat rendah. Namun, perkembangan kehidupan politik yang mengangkat Vanuatu mengembangkan potensi negara yang dimiliki seperti Pariwisata dan daerah konstruksi.⁹ Sebagai negara kecil, Vanuatu termasuk negara yang sangat vokal dalam menyuarakan aspirasi mereka terutama tentang isu Separatisme Papua. Tergabungnya Vanuatu menjadi anggota MSG ada awalnya berbicara tentang permasalahan ekonomi, sosial, serta isu kemanusiaan. Namun, isu Papua selalu dibawa oleh Vanuatu yang menunjukkan partisipasinya sebagai pendukung gerakan kemerdekaan Papua.

Perdebatan antara Vanuatu dan Fiji juga sempat terjadi ketika Fiji mempengaruhi negara anggota MSG lainnya untuk memasukkan Indonesia sebagai anggota. Hal ini bertentangan dengan konsep regionalitas yang dianut oleh organisasi tersebut. Perihal isu separatisme Papua menjadi salah satu bahan diskusi disebabkan oleh solidaritas terhadap ras melanesia. Partisipasi Fiji terhadap separatisme ditunjukkan melalui kesediaan negara tersebut untuk membangun kantor perwakilan Rakyat Papua Barat serta membantu para aktivis untuk membuka kantor perwakilan di negara pasifik lainnya seperti Papua Nugini. Selain itu, Vanuatu juga menjadi negara yang selalu mengungkit isu tentang pelanggaran HAM di Papua pada sidang PBB.

4. Kepulauan Solomon

Kepulauan Solomon merupakan salah satu dari negara-negara kawasan Pasifik Selatan yang masuk dalam kategori negara miskin. Hal

⁹ *Ibid*, hlm. 94.

menarik dari negara ini bahwa meskipun masuk dalam negara miskin, Kepulauan Solomon memiliki tingkat usia produktif yang lumayan tinggi. Namun, hal ini tidak diseimbangi dengan infrastruktur serta kehidupan ekonomi yang layak.

Dalam kaitan Kepulauan Solomon dan internasionalisasi separatisme Papua, negara ini termasuk yang mendukung Papua untuk memerdekakan diri dari Indonesia. Kepulauan Solomon bergerak bersama dengan Vanuatu dalam menyuarkan pelanggaran HAM di Papua melalui sidang PBB tahun 2016 dan 2017. Pada tahun 2016, Kepulauan Solomon sangat menunjukkan antusias dalam menyuarkan isu pelanggaran HAM di Papua. Hal ini yang kemudian menjadi konsiderasi Indonesia untuk melakukan pendekatan kerjasama intensif kepada kepulauan Solomon. Kepulauan Solomon tidak menunjukkan posisinya sebagai posisi yang agresif dalam mendukung Papua sehubungan dengan posisi negara tersebut yang masih membutuhkan bantuan dari negara lain.

5. Negara Federasi Mikronesia

Negara Federasi Mikronesia merupakan salah satu negara kawasan Pasifik Selatan yang masih dalam kekuasaan federasi Amerika Serikat. Penduduk Mikronesia sendiri didominasi oleh pengungsi yang berasal dari Guam. Indonesia sendiri telah mengembangkan hubungan bilateral dengan Mikronesia melalui kunjungan Presiden Mikronesia, Peter Martin Christian pada 18 Juli 2018.¹⁰ Diketahui bahwa Presiden Mikronesia masih merupakan keturunan suku Maluku, dimana Maluku adalah salah satu pulau di Indonesia. Hubungan kerjasama ini dilakukan juga dengan melakukan kunjungan Presiden Mikronesia ke pulau yang masih memiliki ikatan darah.

Dalam konteks separatisme Papua, negara Mikronesia saat ini mulai menunjukkan posisinya dalam mendukung kedaulatan Indonesia.

¹⁰ Presiden RI.go.id, "*Kunjungan Kenegaraan dan 'Pulang Kampung' Presiden Mikronesia*", dalam <http://presidenri.go.id/berita-aktual/kunjungan-kenegaraan-dan-pulang-kampung-presiden-mikronesia.html>, diakses pada 8 Februari 2019.

Hal ini diperkuat dengan diplomasi yang dilakukan oleh Indonesia dalam meningkatkan kerjasama bilateral dengan Mikronesia yang telah terjalin sejak 1991. Namun, karena posisi Mikronesia yang memiliki banyak pulau serta pengamanan militer yang minim berdampak pada jebolnya pengawasan terhadap gerak ULMWP di negara tersebut.

6. Tuvalu

Negara Tuvalu merupakan salah satu dari negara kawasan Pasifik Selatan yang menjadi persinggahan bagi para imigran. Tuvalu masuk dalam kategori negara kecil di kawasan Pasifik Selatan. Negara Tuvalu yang berdekatan dengan Nauru mengandalkan kekayaan alam laut dimana dominasi wilayah dikuasai oleh laut.

Dalam konteks separatisme Papua, Tuvalu masuk dalam kubu Vanuatu dan mendukung Papua untuk merdeka dari Indonesia. Hal ini sebagaimana terlihat melalui respon Tuvalu yang menyetujui klaim Vanuatu pada sidang PBB, 2 Oktober 2018. Vanuatu yang menyinggung kembali tentang isu pelanggaran HAM di Papua.¹¹ Meskipun mendapat teguran keras dari Indonesia, namun tetap dibenarkan oleh Tuvalu dan disetujui untuk diangkat isu tersebut pada dewan Dekolonisasi PBB.

7. Kepulauan Marshall

Sama halnya dengan negara Federasi Mikronesia, Kepulauan Marshall juga berada dalam kekuasaan Amerika Serikat dan masuk dalam negara federasi. Bentuk negara kepulauan Marshall yang didominasi oleh beberapa pulau juga menjadikan negara ini menjadi salah satu negara tampungan para imigran. Kepulauan Marshall dalam kaitannya dengan isu separatisme Papua menunjukkan sikap netral dan mengutamakan kerjasama serta pencapaian kepentingan nasional setiap negara. Hal ini ditunjukkan melalui respon Kepulauan Marshall pada *Pacific Islands*

¹¹ Helen Davidson, "Indonesia Accuses Vanuatu of 'inexcusable' Support for West Papua", dalam <https://www.theguardian.com/world/2018/oct/03/indonesia-accuses-vanuatu-of-inexcusable-support-for-west-papua>, diakses pada 8 Februari 2019.

Forum (PIF) bahwa perlu adanya Constructive Engagement diantara para anggota, termasuk Indonesia yang merupakan anggota observer pada forum tersebut.

4.1.2 Kementerian dan Lembaga yang Berkontribusi dalam Menangani Internasionalisasi Separatisme Papua

Penanganan isu separatisme Papua pada hakikatnya bukan hanya menjadi tugas dari Presiden dan TNI, tapi peran setiap Kementerian dan Lembaga juga penting dalam mengolah setiap data untuk kemudian akan menjadi perhatian dalam melakukan aksi. Dalam menangani isu separatisme Papua, berikut beberapa Kementerian yang peneliti jadikan sebagai objek penelitian dalam tesis ini.

1. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (KEMENKO POLHUKAM) merupakan kementerian yang dibentuk untuk menangani permasalahan Indonesia yang berkaitan dengan pelanggaran Hukum, keamanan masyarakat serta anomali politik. Kini, KEMENKO POLHUKAM dipimpin oleh Jendral TNI (Purn.) Dr. H. Wiranto, S.H. yang dilantik oleh Presiden Jokowi setelah reshuffle Kabinet Kerja kedua menggantikan Luhut Binsar Pandjaitan.¹²

Bidang Otonomi Khusus pada Kementerian ini bertugas untuk mengawasi, mengadakan, dan mengimplementasikan rumusan kebijakan Otonomi Khusus yang diterapkan pada beberapa provinsi di Indonesia, salah satunya adalah Papua dan Papua Barat. Hukum dasar yang menuliskan peran dari bidang Otonomi Khusus sebagaimana tercatat sebagai berikut,

“Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 B Ayat (1) menyatakan negara mengakui dan

¹² Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, “Beranda”, dalam <https://polkam.go.id/>, diakses pada 28 Desember 2018.

menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-undang. Undang-Undang yang dimaksud adalah Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Adapun yang dimaksud dengan satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus adalah daerah yang diberi otonomi khusus, yaitu Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Provinsi Papua. Adapun daerah istimewa adalah Daerah Istimewa Aceh (Nanggroe Aceh Darussalam) dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).”¹³

Sesuai dengan peraturan diatas maka KEMENKO POLHUKAM bekerja sama dengan kementerian dan lembaga terkait serta pemerintah daerah dalam menerapkan Kebijakan Otonomi Khusus. Selain itu, polemik isu separatisme Papua yang menjadikan otonomi khusus sebagai salah satu alasan untuk memerdekakan diri juga melibatkan bagian koordinasi otonomi khusus dalam perannya meninjau kembali apa saja yang menjadi kekurangan dari kebijakan tersebut.

Selain itu, beberapa tahun terakhir, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Jendral TNI (Purn.) Dr. H. Wiranto, S.H sering diutus oleh Presiden untuk menjadi perwakilan Indonesia dalam berdialog dengan negara-negara Kawasan Pasifik Selatan. Peneliti mendapat kesempatan untuk mewawancarai Asisten Deputi Koordinasi Otonomi Khusus Brigjen TNI Danu Prionggo, S.Sos untuk mendapat data pendukung dalam melancarkan penyusunan tesis ini.

2. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia

Hubungan kerjasama serta pengakuan Indonesia pada dunia internasional tidak lepas dari peran para diplomat Indonesia dibawah Kementerian Luar Negeri. Sebagai salah satu 3 kementerian utama, dibawah kepemimpinan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi Kementerian Luar Negeri (KEMLU) bekerja sebagai garda utama dalam negosiasi isu-isu internasional di hadapan negara lainnya serta menjadi perantara Presiden dalam melakukan dialog pada tataran internasional. Dalam

¹³ *Ibid.*

kaitannya dengan isu internasionalisasi separatisme Papua juga menjadi agenda KEMLU terutama dalam bernegosiasi dengan negara-negara Pasifik. Yang dipercaya oleh KEMLU dalam menangani isu ini secara detail adalah bagian organisasi KEMLU Direktorat Jendral Asia Pasifik dan Afrika dibawah kepemimpinan Desra Percaya sebagai Direktur Jendral Asia Pasifik dan Afrika. Adapun peran dari direktorat ini adalah sebagai berikut,¹⁴

- a. Perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri pada lingkup bilateral, intrakawasan, dan antarkawasan di Asia Pasifik dan Afrika;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri pada lingkup bilateral, intrakawasan, dan antarkawasan di Asia Pasifik dan Afrika;
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri pada lingkup bilateral, intrakawasan, dan antarkawasan di Asia Pasifik dan Afrika;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri pada lingkup bilateral, intrakawasan, dan antarkawasan di Asia Pasifik dan Afrika;
- e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri pada lingkup bilateral, intrakawasan, dan antarkawasan di Asia Pasifik dan Afrika;
- f. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

¹⁴ Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, "Struktur Kementerian Luar Negeri", dalam <https://www.kemlu.go.id/id/tentang-kemlu/struktur-kemlu/Organization.aspx?kementerianID=2>, diakses pada 28 Desember 2018.

Untuk menunjang kelancaran penyusunan tesis ini, peneliti mendapat kesempatan untuk mewawancarai Kepala Sub Direktorat Asia Timur dan Pasifik-5 Direktorat Asia Timur dan Pasifik, Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika, Bapak Arif Gunawan. Selain itu, peneliti mendapat kesempatan juga untuk menghadiri seminar prodi Diplomasi Pertahanan pada 31 Juli 2018 dimana yang menjadi pembicara pada saat itu adalah Rossy Verona selaku Sekretaris Direktorat Jendral Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.

3. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia

Pada akhirnya, dalam mencapai kedaulatan tentu diperlukan sistem pertahanan yang selalu berkembang dalam menjaga keutuhan wilayah Republik Indonesia. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (KEMHAN) merupakan salah satu dari tiga kementerian utama, yakni Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Dalam Negeri yang mewadahi TNI dalam mempertahankan keutuhan wilayah Indonesia. Dibawah kepemimpinan Jenderal TNI (Purn.) Ryamizard Ryacudu sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Jokowi menjalankan tugasnya untuk menangani segala isu yang berkaitan dengan pengrusakan terhadap sistem pertahanan Indonesia.

Isu internasionalisasi separatisme Papua tak dapat dipungkiri menjadi polemik yang mengganggu sistem pertahanan Indonesia. Oleh karena itu, KEMHAN juga mengambil bagian penting dalam menangani isu tersebut terutama kaitannya dengan pertahanan. Sebagai tangan kanan pemerintah dalam perumusan kebijakan pertahanan Indonesia, KEMHAN bertugas untuk menyusun dan membina kerjasama yang terpadu dengan negara-negara Kawasan Pasifik Selatan. Dalam pencapaian strategi diplomasi pertahanan Indonesia, Kementerian Pertahanan Indonesia menjadi garda terdepan setelah tentunya berkoordinasi dengan Kementerian lainnya dala isu internasionalisasi separatisme Papua.

Dalam penyusunan tesis ini, peneliti mendapat kesempatan untuk mewawancarai Kolonel Kav. Oktaheroe Ramsi, S.IP., M.Sc selaku Kepala Sub Direktorat Multilateral, Direktorat Kerjasama Internasional Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.

4. Pusat Penelitian Politik (P2P) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) merupakan lembaga pemerintah yang bergerak pada bidang penelitian dan pengkajian berbagai bidang, baik eksakta ataupun ilmu sosial. LIPI dibagi dalam beberapa bagian sesuai dengan bidang yang dikaji atau diteliti. Dalam konteks isu yang dibahas peneliti, Pusat Penelitian Politik (P2P) LIPI merupakan bagian yang bergerak khusus melakukan berbagai penelitian dan kegiatan ilmiah lain di bidang politik terutama yang menyangkut perkembangan politik lokal, perkembangan politik nasional, isu-isu regional dan masalah internasional dengan penekanan kuat pada masalah-masalah kontemporer. Kebijakan-kebijakan tersebut terus berlanjut hingga sekarang.¹⁵

Peran LIPI sangatlah penting terkait dengan riset-riset yang dilakukan. Dalam penelitian bidang politik, kajian isu tidak hanya terbatas pada lingkup nasional, tetapi sudah menjangkau kawasan internasional. Hasil penelitian yang didapat kemudian akan menjadi pertimbangan pemerintah Indonesia dalam merumuskan langkah ataupun kebijakan terkait dengan isu yang terjadi.

Dalam konteks kasus separatisme Papua, LIPI telah melakukan banyak penelitian baik dalam kajian domestik hingga perkembangan internasionalisasi separatisme Papua. Penelitian tersebut puncaknya pada tahun 2006 diterbitkan buku Papua Roadmap yang berisi tentang kajian isu separatisme dari perjalanan sejarah hingga politik. Acuan tersebut kemudian berakhir pada skema penyelesaian konflik Papua. Skema ini

¹⁵ Pusat Penelitian Politik LIPI, "Tentang P2P", dalam <http://www.politik.lipi.go.id/tentang-p2p/history>, diakses pada 17 Januari 2019.

diajukan kepada pemerintah sebagai salah satu konsiderasi proses pendekatan kepada masyarakat Papua selain dari cara militer. Dalam penelitian tesis ini, peneliti mendapat kesempatan mewawancarai Dr. Adriana Elisabeth yang merupakan peneliti Politik pada Pusat Penelitian Politik (P2P) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)

4.2 Hasil penelitian

4.2.1 Perkembangan Isu Internasionalisasi Separatisme Papua

1. Efektivitas Kebijakan Otonomi Khusus Papua

Gerakan separatisme Papua pada perkembangannya tidak hanya bergerak dengan kekerasan, namun secara politik juga dikembangkan. Hal ini terlihat pada partisipasi negara-negara tetangga yang ikut mengambil bagian dalam menyuarakan kemerdekaan bagi Papua. Hal ini juga dibenarkan oleh Bapak Kolonel Kav. Oktaheroe Ramsi, S.Ip., M.Sc selaku Kepala Sub Direktorat Multilateral Direktorat Kerjasama Internasional Kementerian Pertahanan Indonesia melalui pernyataannya yakni,

“Barrier yang masih bisa disebut sebagai kedaulatan sudah menjadi borderless. Putaran ini sama seperti yang terjadi pada zaman kerajaan. Kunjungan bisa dilakukan secara bebas. Fluktuasi terjadi karena kesadaran negara-negara pasifik meningkat.”¹⁶

Pernyataan ini sebagai bentuk *warning system* Indonesia dalam menyikapi kemungkinan-kemungkinan yang terjadi dalam perkembangan gerakan separatisme Papua. Dalam perspektif sejarah perjalanan Papua, terjadi pro dan kontra terhadap apa yang terjadi pada proses direbutnya Irian Jaya oleh Indonesia hingga pendeklarasian PEPERA (Penentuan pendapat Rakyat) yang dianggap belum memenuhi sepenuhnya apa yang menjadi keinginan Orang Asli Papua (OAP) hingga berujung pada terbentuknya organisasi yang memberontak untuk memisahkan Papua

¹⁶ Wawancara dengan Kepala Sub Direktorat Multilateral pada Direktorat Kerjasama Internasional Kementerian Pertahanan Indonesia, pada 12 Oktober 2018

dari Indonesia dan membentuk negara sendiri pada 1971. Kemudian, berkembang dengan pembentukan Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang menjadi pilar utama para aktivis separatis.

Pemerintah Indonesia segera mengambil langkah dengan mencanangkan Undang-Undang Otonomi Khusus sebagai bentuk jaminan terhadap Papua dalam mengembangkan provinsi tersebut. Awal dibentuknya UU Otonomi Khusus sebagai hasil dari forum dialog yang dihasilkan melalui para tetua adat Papua dengan Presiden Republik Indonesia pada kala itu, yakni Presiden B.J. Habibie tahun 1999. Hal ini dilakukan Presiden Habibie saat itu untuk memberhentikan peraturan Daerah Operasi Militer (DOM) yang diberlakukan pada zaman pemerintahan Presiden Soeharto untuk meredam aksi anarkis dari para aktivis Separatis Papua.¹⁷

Pencanangan UU Otonomi Khusus saat itu dapat dikatakan sebagai keputusan yang bersifat urgensi. Hal ini dikarenakan tindakan pemberontakan yang dilakukan oleh aktivis OPM mengganggu stabilitas ekonomi dan politik Indonesia, ditambah dengan keadaan urgensi dari pecahnya Timor Leste. Oleh karena itu, Presiden Habibie mengajukan penyelesaian konflik Provinsi Irian Jaya melalui mekanisme demokrasi dengan pemberian Otonomi Daerah sesuai UUD, ketetapan MPR, UU (DPR), dan peraturan daerah.¹⁸ Namun, pemberlakuan UU Otonomi Khusus tidak menjadi jaminan meredamnya keinginan masyarakat Papua untuk memerdekakan diri.

Disatu sisi, ada beragam argumentasi yang dikemukakan oleh masyarakat Papua tentang dinamika Otonomi Khusus. Salah satu alasan yang paling diutamakan adalah masalah mengenai Hak Asasi Manusia pada implementasinya. Pada UU Otonomi Khusus dideklarasikan tentang Hak Asasi Manusia dalam konteks OAP adalah sebagai berikut,

¹⁷ Poengky Indarti, dkk., *Sekuritisasi Papua*, (Jakarta: Imparsial, 2011), hlm. 112.

¹⁸ Bacharuddin Jusuf Habibie, *Detik-Detik yang Menentukan*, (Jakarta: THC Mandiri, 2006), hlm. 134-135.

“Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan penduduk Provinsi Papua wajib menegakkan, memajukan, melindungi, dan menghormati Hak Asasi Manusia di Provinsi Papua”¹⁹ yang kemudian mengacu pada pemberdayaan OAP berdasar pada “Orang asli Papua berhak memperoleh kesempatan dan diutamakan untuk mendapatkan pekerjaan dalam semua bidang pekerjaan di wilayah Provinsi Papua berdasarkan pendidikan dan keahliannya”²⁰. Peraturan tersebut diklaim oleh OAP mengalami anomali dimana tidak terjadi sesuai dengan fakta yang terjadi. Kurangnya kesetaraan pendidikan, peningkatan sumber daya manusia bagi OAP dan pemberian lapangan kerja yang masih memunculkan distrust terhadap OAP berdampak pada kemunduran psikologis OAP karena adanya penolakan.

Hal ini kemudian direspon lebih lanjut oleh Bapak Brigjen TNI Danu Prionggo, S.Sos selaku Asisten Deputi Koordinasi Otonomi Khusus pada Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan.

“Kalau pertanyaannya apakah otsus berjalan dengan baik atau tidak, itu terkait pada kebijakannya, dalam tataran kebijakan atau tataran implementasi. Kalau pada tataran kebijakan sesuai dengan UU No.21 Tahun 2001 dan UU No.35 Tahun 2008 itu bisa saja dianalisis dimana kelemahannya. Artinya, kebijakan yang ada tidak ada kebijakan yang seratus persen benar. Kebijakan itu sudah memenuhi kaidah yang ada dalam konteks Papua. Satu-satunya Undang-Undang di Indonesia tidak perlu penjabaran dari Perundang-Undangan lain cuman satu penjabaran, dalam beberapa pasal tertentu atau pasal turunan. Nah, Undang-Undang di Papua cuman satu yakni Undang-Undang yang mengatur protokoler MRP, selebihnya bisa diatur oleh PERDASUS, Peraturan Daerah Khusus, dan PERDASI peraturan daerah Provinsi. PERDASI mengikat warga Papua sedangkan PERDASUS mengikat orang asli Papua. Yang selalu dipermasalahkan adalah OAP. Berbicara tentang implementasi sudah berkaitan dengan asas desentralisasi dan diatur dalam PERDASUS. Artinya kalo berbicara tentang implementasi itu bukan lagi di pusat.”²¹

¹⁹ Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, Pasal 45, Ayat (1).

²⁰ *Ibid*, Pasal 62 Ayat (2).

²¹ Wawancara dengan Asisten Deputi Koordinasi Otonomi Khusus pada Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, pada 3 Oktober 2018.

Mewujudkan implementasi suatu kebijakan yang disusun berdasarkan tingkat urgensi bukan merupakan perkara yang mudah, terutama jika kebijakan terkait adalah hasil defensif dari langkah pemerintah untuk meredam pemberontakan oleh masyarakat Papua saat itu yang meminta untuk memerdekakan diri. Hal ini yang kemudian menjadi perdebatan bagi OAP yang mengklaim bahwa Otonomi Khusus bukan hanya sekedar pembangunan ekonomi ataupun infrastruktur, melainkan unsur-unsur yang menyangkut keberlangsungan ras OAP juga menjadi prioritas dalam implementasi UU Otonomi Khusus sebagaimana diungkap oleh Gubernur Provinsi Papua sebagai berikut,

“Setelah perjalanan 5 tahun sudah banyak implementasi Otonomi Khusus secara garis besar yang telah berhasil. Program-program yang dijalankan seperti rutinitas, ATK, setiap tahun. Yang akan dilakukan 5 tahun mendatang adalah membentuk badan Baru dana otsus dan orasi Papua. Seluruh dana otsus dikelola oleh badan tersebut. Dikerjakan oleh orang Papua dan diperuntukkan kepada Orang Asli Papua”²²

Pernyataan diatas menjelaskan bahwa yang dikritik pada kebijakan Otsus adalah bagaimana hak OAP untuk mengembangkan kapasitas yang dimiliki selama ini tidak berjalan dengan baik. Penekanan terletak pada pengembangan sisi psikologis serta bagaimana menjunjung Hak Asasi Manusia dari Orang Asli Papua (OAP). Kembali lagi pada penekanan implementasi yang disinggung oleh perwakilan KEMENKOPOLHUKAM bahwa Otonomi Khusus telah diserahkan seluruhnya bagi Pemerintah Provinsi Papua untuk selanjutnya ditangani secara mandiri. Namun, hal ini tidak berlaku pada pengembangan Sumber Daya Manusia dan hanya berfokus pada ekonomi dan infrastruktur.

Sekilas, hal ini terlihat seperti isu yang diisukan secara politik. Namun, hal ini berkaitan erat dengan perjalanan sejarah Papua. Perbedaan ras yang signifikan dan eksplisit serta letak pulau paling terjauh dari pemerintah pusat mendukung keterlambatan pembangunan

²² Gubernur Provinsi Papua “Respon Gubernur Terhadap Kedatangan TNI di Nduga dan Perkara Otonomi Khusus” pada Press Conference di Gedung Provinsi Papua Jayapura, 21 Desember 2018

Papua baik secara ekonomi maupun sumber daya manusia. Hal ini juga didukung oleh pernyataan yang dikemukakan oleh Dr. Adriana Elisabeth, M.Soc.,Sc selaku Kepala Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia bidang Politik Internasional yang menyatakan:

“Kegagalan pembangunan. Paradigma baru dalam konteks papua yang sudah berkembang saat ini. Presiden Jokowi sudah membangun infrastruktur dan sangat strategis. Itu sebuah pilihan rasional yang paling mungkin dan paling mudah. Tapi kemudian belum mencakup pembangunan sosial yakni belum merata dari segi pendidikan hingga ekonomi. Sejarah, dari kaca mata pemerintah mereka merasa insecure bahwa hal itu sudah final dan tidak perlu dibicarakan lagi. Sedangkan dari pandangan LIPI bahwa secara akademik bisa diselesaikan. Dari seluruh isu tersebut, ada satu jalan yang membuka papua ke arah pembangunan yg lebih menggambarkan karakteristik papua yakni dengan mengadakan dialog. Budaya papua adalah budaya bertutur. Skema dialog yang bisa dicoba. Tahun 1999, habibie menerima tokoh-tokoh papua namun tidak ada proses dialog hanya proses mendengarkan. Dialog adalah model diplomasi Papua apapun isunya. Ideologi separatis tidak bisa dihilangkan dan pemerintah masuk dengan ideologi ekonomi namun tidak sepenuhnya dapat diselesaikan. Yang dipertanyakan adalah HAM dikemanakan. Trauma yang tidak pernah diselesaikan. Konteks papua yang masyarakatnya terus merasa terancam dengan trauma berkepanjangan.”²³

Dalam perspektif pembangunan Papua, totalitas pengembangan harus dilakukan secara menyeluruh. Seperti yang diutarakan oleh Ibu Adriana bahwa proses dialog adalah yang paling dibutuhkan dalam penyelesaian Papua hingga ke akarnya. Pemerintah Indonesia sejak merebut Papua di tahun 1962 telah menanamkan operasi militer dengan persenjataan terkuat di daerah tersebut. Selain itu, pada zaman Presiden Soeharto menetapkan Daerah Operasi Militer (DOM) di Papua sehingga penyelesaian konflik hingga yang paling terkecil cenderung dilakukan melalui cara militer. Cara kekerasan inilah yang dianggap memegang peran terbesar dalam menjatuhkan psikologis masyarakat asli Papua dan berdampak pada trauma yang berlanjut dalam kurun waktu yang lama.

²³ Wawancara dengan Kepala Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Bidang Politik Internasional, pada 22 Oktober 2018.

Pada prakteknya, usaha membangun dialog dilakukan oleh Presiden Habibie dengan para tokoh Papua namun dicermati bahwa kejadian tersebut lebih sebagai proses mendengarkan dari Pemerintah Pusat untuk menemukan solusi terhadap Papua yang sekarang produknya disebut sebagai UU Otonomi Khusus. Karena kebijakan tersebut dianggap lahir dari satu arah, maka hingga saat ini masyarakat Papua terutama OAP akan terus menganggap bahwa Otsus tidak berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Papua dan hanya sebagai jaminan peredam konflik oleh Pemerintah Pusat.

Di sisi lain, pembangunan signifikan yang saat ini digerakkan oleh presiden Jokowi melalui implementasi kebijakan Nawacita adalah langkah terbesar yang dialami Papua. Pembangunan sarana serta infrastruktur meskipun dinilai oleh segelintir aktivis Separatis tidaklah cukup, bagi sebagian besar masyarakat Papua merupakan kemajuan pesat yang bisa membantu aktivitas masyarakat terutama di daerah pegunungan yang terhambat dengan jalur ke kota kini dapat menikmati Jalan Trans Papua.²⁴

2. Sinergi Kementerian dan Lembaga

Tugas dari setiap Kementerian dan lembaga pemerintah mengacu pada kesejahteraan rakyat dan bagaimana untuk memajukan negara. Dengan porsi kerja serta bidang yang berbeda-beda, memacu setiap jajaran pemerintahan untuk meningkatkan kapasitas di bidang masing-masing. Hal ini berlaku juga dengan posisi setiap lembaga dalam menyelesaikan isu atau konflik yang terjadi baik sebagai akibat dari politik dalam negeri ataupun politik luar negeri.

Sama halnya dengan cara pemerintah dalam menyelesaikan isu internasionalisasi separatisme Papua. Hal ini bukan hanya menjadi tugas dari Presiden dan kementerian Luar Negeri saja atau Kementerian Pertahanan, melainkan setiap jajaran pemerintahan patut berkoordinasi

²⁴ Kominfo, "2 Tahun Kerja Nyata Jokowi-JK". www.kerjanya.id, 2016, dalam <https://web.kominfo.go.id/sites/default/files/KSP%2020Tahun%20Jokowi%20JK.pdf>, diakses pada 28 Desember 2018.

dalam menangani isu tersebut. Seperti contoh, TNI dalam melakukan diplomasi militer akan mengikutsertakan KEMLU sebagai garda terdepan Indonesia dalam urusan kerjasama internasional seperti yang diutarakan oleh Kepala sub Direktorat-5 Asia Timur dan Pasifik,

“Masalah sinergi antar K/L ada mekanismenya. Koordinasi antara kementerian tentu ada bahkan dengan pihak keamanan dan pertahanan.”²⁵

Koordinasi yang dimaksud adalah dalam penyampaian informasi ataupun negosiasi dengan negara lain, wajib bagi setiap instansi yang terlibat berada pada jalur yang sama. Akan tetapi, hal ini tentu membutuhkan proses yang panjang. Dalam isu internasionalisasi separatisme Papua, instruksi Presiden tidak lagi berfokus hanya kepada KEMLU dalam penyelesaian di negara-negara Kawasan Pasifik Selatan namun juga mengikutsertakan MENKO POLHUKAM. Selain itu, KEMHAN yang bergerak pada bidang pertahanan juga memberi kontribusi melalui kerjasama pertahanan. Dibalik koordinasi tersebut, tentu memiliki kelemahan terutama jika dikaitkan dengan negara-negara Kawasan Pasifik Selatan yang diakui oleh Sekretaris Dirjen Asia Pasifik dan Afrika membutuhkan biaya yang tidak sedikit untuk sekali melakukan kunjungan dikarenakan terhambat oleh keadaan disana yang susah dengan transportasi.²⁶

Disisi lain, sinergi Kementerian dan Lembaga di Indonesia tidak sepenuhnya dapat berjalan dengan baik. Hal ini seperti yang diutarakan oleh Kepala Sub Direktorat Multilateral KEMHAN,

“Kemlu dan kemhan pernah terjadi satu friksi bahwa menhan lebih banyak ke luar negeri dibandingkan menlu sendiri. AS tahu bahwa jika lewat kemhan proposal yang diajukan akan susah untuk diterima. Pertama, belum ada riset yang menentukan hal tersebut dan kedua pada tahap leverage”²⁷

²⁵ Wawancara dengan Kepala Sub Direktorat Multilateral, *op.cit*

²⁶ Rosy Verona, *op.cit*.

²⁷ Wawancara dengan Kepala Sub Direktorat Multilateral, *op.cit*

Pernyataan diatas menunjukkan bahwa sinergi Kementerian dan Lembaga di Indonesia hingga saat ini tidak memiliki acuan yang absolut dalam mengukur seberapa efektif koordinasi tersebut dilakukan. Seperti yang disampaikan bahwa perjalanan luar negeri yang dilakukan pun masih diperdebatkan tentang intensitas sesuai porse atau bidangnya. Dalam isu internasionalisasi separatisme Papua, KEMENKO POLHUKAM sering menjadi utusan Indonesia dalam melakukan kunjungan negara di kawasan Pasifik Selatan. Intensitas perjalanan yang dilakukan oleh Menteri Wiranto dinilai telah menyamai posisi Menteri Luar Negeri Indonesia di kawasan tersebut.

Keadaan ini juga merujuk pada posisi konflik Separatisme Papua apakah cukup memenuhi kriteria untuk dianggap sebagai ancaman terhadap pertahanan negara atau masih dikategorikan dalam ancaman keamanan. Kementerian Pertahanan menjadi aktor utama ketika isu tersebut menjadi ancaman bagi pertahanan Indonesia dengan melibatkan TNI sebagai eksekutor. Sehingga, segala bentuk kerjasama baik bilateral maupun multilateral yang menghasilkan kerjasama pertahanan secara otomatis melibatkan KEMHAN untuk selanjutnya berkoordinasi dengan TNI.

Output dari setiap koordinasi adalah munculnya petunjuk-petunjuk baru dalam menyimpulkan solusi apa yang bisa ditawarkan. Hal ini juga menjadi kritik oleh Jurnalis Media Indonesia, Emir Chairullah

“Yg dilakukan oleh KBRI Australia adalah pendekatan terhadap negara-negara Kawasan Pasifik Selatan adalah Diplomasi formal. Harusnya diplomasi juga dilakukan secara informal. Mendekati orang-orang yang dekat dengan negara-negara pasifik yg berpotensi utk mengemukakan suara di PBB. Pekerja politik , Pendidikan, kemasyarakatan. Intensinya lebih formal yakni ke kaum elit.”²⁸

Hal ini ada kaitannya dengan bagaimana koordinasi selama ini berjalan. Pihak KBRI Australia melakukan pendekatan terhadap negara-

²⁸ Wawancara dengan Jurnalis Media Indonesia, *op.cit.*

negara Kawasan Pasifik Selatan berdasar dari koordinasi yang dilakukan pada level pusat. Jika isu internasionalisasi separatisme Papua menjadi luas karena peran golongan-golongan seperti komunitas masyarakat, kelompok pendidikan, hingga pemuka agama maka Indonesia sebaiknya juga melakukan pendekatan terhadap komunitas tersebut.

Selain itu, dalam urusan politik dalam negeri juga dikaitkan dengan koordinasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menyikapi kebijakan yang ada. Kebijakan otonomi khusus yang berada pada KEMENKO POLHUKAM juga diminta untuk meningkatkan *awareness* kepada Papua dalam mengelola kebijakan tersebut bukan hanya dalam segi pendanaan, namun juga dalam aspek sosial.

“Dilakukan transisi dari sentralistik menjadi desentralistik dimana tanpa ada bimbingan langsung diminta ngolah dana. Otsus papua yang diketahui cuman dana. Otsus merupakan bentuk kompromi politik. Seharusnya diberi bimbingan bagaimana cara mengatur. Pemahaman otsus seharusnya dibenarkan kembali. Pemda papua seharusnya menggunakan seluruh otoritas namun karena label separatis, setiap gerakan dianggap sebagai bentukan separatis.”²⁹

Dinamika kebijakan Otsus harus menjadi perhatian pemerintah yang lebih serius dengan tujuan untuk mengedukasi Provinsi Papua dalam mengelola wilayah tersebut berdasar dari hasil bimbingan oleh pemerintah pusat. Meskipun mengacu pada asas desentralisasi bahwa implementasi diserahkan kepada pemerintah daerah, namun perlu adanya koordinasi dari pemerintah pusat untuk membimbing pemerintah daerah dalam implementasi kebijakan Otonomi khusus.

3. Pergerakan Internasionalisasi Separatisme Papua

Sejak awal tercetusnya gerakan separatisme selain dipicu oleh pengalaman sejarah, juga berkaitan dengan otsus yang telah dibahas sebelumnya. Namun, hal ini menimbulkan persepsi berbeda dari masyarakat Papua tentang definisi merdeka bagi mereka. Hal ini sesuai

²⁹ Wawancara dengan Kepala Pusat Penelitian Politik, *op.cit.*

dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Bapak Emir Chairullah, jurnalis Media Indonesia sebagai berikut,

“Papua lepas dari Indonesia, Papua merdeka bukan ingin lepas dari Indonesia tetapi Papua ingin merdeka secara paham. Menyejahterahkan org papua secara merata bukan hanya elit, jgn terjebak dengan istilah merdeka. Merdeka tidak sama dengan separatis. Merdeka memiliki makna tersendiri.”³⁰

Pernyataan diatas mengacu pada alasan Papua yang ingin memerdekakan diri bukan hanya dalam pengembangan infrastruktur daerah melainkan pengembangan Masyarakat Papua baik pengembangan diri maupun pengembangan kebebasan dari stigma perbedaan ras. Hal ini tercermin dalam masa lalu Papua yang dikaitkan dengan militerisasi sehingga berdampak pada trauma, khususnya bagi Orang Asli Papua (OAP).

Rekognisi menjadi isu yang diprioritaskan berdasar dari tingkat urgensi. Ketika dihadapkan oleh gejolak kebijakan Otonomi Khusus, masyarakat Papua menyuarakan HAM sebagai isu yang harus diseimbangkan dengan pembangunan ekonomi. Pembangunan infrastruktur serta perbaikan taraf ekonomi membutuhkan keseimbangan dalam meningkatkan sumber daya manusia terutama memberi kesempatan bagi OAP dalam mengembangkan potensi yang dimiliki. Sayangnya, stigma separatisme telah melekat dan gambaran penyelesaian melalui sistem militer pun menjadi solusi yang dianggap masuk akal.

Dalam mengkategorikan aktivis separatis pun tidak semuanya memiliki prinsip yang sama. Mayoritas masyarakat Papua mengumandangkan merdeka secara Hak Asasi Manusia, yakni dengan kebebasan berkarya di tanah sendiri tanpa membuat pernyataan bahwa akan membentuk negara sendiri. Di sisi lain, ada aktivis separatis yang bersembunyi dan menyuarakan aspirasi melalui tindakan anarkis, yang

³⁰ Wawancara dengan Jurnalis Media Indonesia, pada 17 Oktober 2018.

kemudian disebut sebagai Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSB). Tentu hal ini menimbulkan keresahan dan sistem pertahanan di Papua secara otomatis akan ditingkatkan melalui penambahan personil militer serta Polri dalam menjaga aksi penembakan lebih lanjut. Seperti yang terjadi pada aksi penembakan di Nduga terhadap pekerja Jalan Trans Papua dengan 10 pekerja menjadi korban penembakan oleh KKSB. Hal ini membuat geram pemerintah Indonesia dan berdampak pada penambahan personil militer di daerah rawan.

Sebaliknya, respon yang bertolak belakang diberikan oleh Gubernur Provinsi Papua. Beliau berpendapat bahwa masyarakat Papua yang berada di Nduga merasa terancam dengan keberadaan TNI dan Polri dimana eksistensi militer mengakibatkan trauma terhadap masyarakat sipil. Fakta ditambahkan dengan adanya saksi mata yang melihat pembuangan zat kimia dari atas udara dan menelan banyak korban. Hal ini diperkuat dengan beredarnya jurnal serta tulisan oleh para aktivis tentang zat kimia ini yang telah merenggut nyawa beberapa masyarakat Nduga.³¹ Hal ini menjadi kontroversi dikarenakan kedatangan personil militer ke wilayah tersebut untuk mencari pelaku penembakan pekerja jalan Trans Papua yang dibunuh oleh KKSB. Disatu sisi, merupakan tindakan kemanusiaan jika TNI bekerja sama dengan Polri dalam memberantas aksi penembakan oleh KKSB, namun disisi lain ketika masyarakat sipil yang merupakan OAP menjadi korban, maka masyarakat Papua turut merasakan aksi kekerasan terhadap OAP. Hal ini sebagai bentuk nyata ketakutan terhadap punahnya ras OAP di Provinsi Papua.

Berkembang dari isu kontroversi UU Otsus hingga anomali pengembangan Hak Asasi OAP, gerakan separatisme berlanjut hingga terdengar oleh negara tetangga di kawasan Pasifik Selatan. Seperti diungkapkan oleh Pak Oktaheroe bahwa batas-batas yang menjadi

³¹ John Martinkus and Mark Davis, "Exclusive: Chemical Weapons Dropped on Papua", The Saturday Paper, 2019, dalam thesaturdaypaper.com.au. Diakses pada 1 Januari 2019.

penanda kedaulatan suatu negara kini menjadi abu-abu.³² Regionalisasi tidak lagi dapat terdefiniskan secara konkret dan setiap isu dari suatu negara secara otomatis menjadi kepentingan bagi negara lain, entah berdasar dari dampak ataupun mengacu pada toleransi antar negara.

Isu separatisme seperti telah dijelaskan sebelumnya merupakan konflik internal Indonesia. Tuntutan menyelesaikan konflik pelanggaran HAM di Papua diklaim oleh OAP tidak juga mendapat perhatian oleh Pemerintah sehingga para aktivis pun mencari cara agar aspirasi mereka didengar, salah satunya yakni dengan meminta perlindungan dan dukungan dari negara lain. Perjalanan gerakan separatisme Papua tidak terlepas dari peran para aktivis yang gencar dalam menyuarakan kemerdekaan Papua. Pejuang gerakan separatis yang memegang pengaruh paling besar hingga saat ini adalah Benny Wenda yang saat ini mendapat perlindungan suaka dari Inggris.

Perjalanan Benny Wenda dimulai setelah adanya operasi Koteka yang dilakukan oleh TNI di Pegunungan Tengah pada tahun 1971-1974. Operasi tersebut dilakukan pada zaman Orde Baru oleh tentara Indonesia dengan tujuan untuk modernisasi masyarakat Papua. Berdasarkan fakta yang diklaim oleh Indonesia pada saat itu modernisasi dilakukan dengan pemberian baju gratis kepada masyarakat Papua terutama yang berada di Pegunungan Tengah. Namun, fakta lain diberikan bahwa terjadi aksi anarkis yang dilakukan oleh TNI pada saat itu kepada setiap masyarakat Papua yang menolak untuk mengganti koteka dengan baju yang diberikan. "Tidak ada data resmi mengenai jumlah orang yang terbunuh, akan tetapi pada tahun 1981 mantan Gubernur Papua, Eliezener Bonay bersaksi di hadapan Pengadilan HAM Papua Barat bahwa jumlah kematian mencapai sekitar angka 3,000."³³

³² Wawancara dengan Kepala Sub Direktorat Multilateral, *op.cit.*

³³ Allard K. Lowenstein, *Indonesian Human Rights Abuses in West Papua: Application of the Law of Genocide to the History of Indonesian Control*. (Yale Law School: International Human Rights Clinic, 2008), hlm. 24.

Peristiwa tersebut merupakan pukulan terberat dan meninggalkan trauma terutama dengan banyak korban jiwa OAP yang dibunuh oleh TNI. Benny Wenda kemudian melakukan gerakan perlawanan dengan membentuk organisasi yang menentang agar operasi KOTEKA dihentikan. Sering berjalan waktu dengan segala perjuangan Benny Wenda. Puncaknya terjadi pada saat kelompok KOTEKA ditawarkan Otonomi Khusus pada tahun 1999 sebagai solusi yang dapat menggantikan permintaan Papua merdeka. Namun, hal ini ditolak dan berimbas pada kebakaran yang dilakukan secara besar-besaran di sepanjang lingkaran Abepura.

Pihak militer mengklaim bahwa peristiwa ini dilakukan oleh kelompok KOTEKA dengan Benny Wenda sebagai pemimpinnya. Namun, hal sebaliknya diklaim oleh para aktivis serta saksi mata bahwa kebakaran tersebut dilakukan oleh pihak Polri.³⁴ Hal ini berujung pada ditangkap dan diadilinya Benny Wenda pada 24 September 2002. Kemudian, Benny Wenda dimasukkan ke dalam Penjara Abepura karena telah melakukan tindakan provokasi terhadap masyarakat Papua. Namun, pada 27 Oktober 2002 Benny Wenda berhasil melarikan diri melalui perbatasan dan mengajukan perlindungan suaka di Inggris.

Perjalanan internasionalisasi separatisme Papua pun dimulai dengan Bergeraknya Benny Wenda mengumpulkan dukungan internasional untuk kemerdekaan Papua setelah mendapatkan perlindungan suaka politik oleh Kerajaan Inggris. Dimulai dari meminta dukungan pada parlemen Inggris melalui Free West Papua Campaign (FWPC) yang berujung pada terbentuknya All Party Parliamentary Groups for West Papua yang bertujuan untuk memberi pengertian terhadap situasi

³⁴ Ibrahim Peyon, "Perjalanan Benny Wenda: Rekayasa Serangan dan penjara Abepura (Bagian 2)", Suara Papua, 2018, dalam <http://suarapapua.com/2018/05/26/perjalanan-benny-wenda-rekayasa-serangan-dan-penjara-abepura-bagian-2/>. Diakses pada 27 Desember 2018.

yang terjadi di Papua Barat dan memperjuangkan Hak Asasi Manusia dari masyarakat Papua.³⁵

Tabel 4.1 Daftar Anggota Parlemen Untuk Kemerdekaan Papua Barat

Register Of All-Party Parliamentary Groups [as at 26 April 2018]

West Papua

Title	All-Party Parliamentary Group on West Papua
Purpose	To promote understanding of the situation in West Papua and the human rights of the West Papuan people.
Category	Country Group

Officers		
Role	Name	Party
Chair & Registered Contact	Alex Sobel	Labour (Co-op)
Co-Chair	Lord Hamies of Pentregarth	Crossbench
Treasurer	Anneliese Dodds	Labour (Co-op)
Vice Chair	John Howell	Conservative
Vice Chair	Lord Kilclooney	Crossbench
Vice Chair	Dr Alan Whitehead	Labour
Vice Chair	Caroline Lucas	Green Party
Vice Chair	Lord Alton of Liverpool	Crossbench

Sumber: Anonim, "Register of All Party Parliamentary Groups", dalam <https://publications.parliament.uk/pa/cm/cmllparty/180426/west-papua.htm>. Diakses pada 27 Desember 2018

Berkembangnya isu internasionalisasi separatisme Papua juga terjadi di Amerika Serikat. Berdasar dari sejarah, AS memiliki relasi yang sangat kuat dengan perjuangan Indonesia dalam merebut Irian Jaya, deklarasi PEPERA, hingga hubungan bilateral Indonesia-AS dalam kontrak kerjasama PT. Freeport yang berlokasi di Timika, Papua. AS memiliki peran penting sehubungan dengan kontribusinya dalam mewujudkan perjanjian New York untuk Papua. Namun, hal ini tidak menjadi penghalang bagi aktivis separatis untuk menggali dukungan dari negara adidaya tersebut. Para aktivis mendapat dukungan dari lembaga-lembaga non-pemerintah yang berada di AS, seperti organisasi kemanusiaan, agama, hingga komunitas minoritas.

³⁵ Anonim, "Register of All Party Parliamentary Groups", dalam <https://publications.parliament.uk/pa/cm/cmllparty/180426/west-papua.htm>. Diakses pada 27 Desember 2018.

Perjuangan yang dilakukan tercapai dengan terbentuknya ULMWP (United Liberation Movement of West Papua) serta dukungan politik internasional dari berbagai negara dengan diijinkan untuk membangun kantor perwakilan di beberapa negara, termasuk Uni Eropa. Puncaknya, Benny Wenda bersama dengan simpatisan gerakan Separatisme Papua baik dalam lingkup internasional maupun domestik mengumpulkan tanda tangan sebagai petisi referendum. Hal ini merupakan produk nyata dari deklarasi Westminster “Internationally Supervised Vote in West Papua” yang diadakan di Parlemen Inggris. Salah satu yang menjadi highlight adalah partisipasi negara-negara Kawasan Pasifik Selatan seperti Tonga, Vanuatu, Kepulauan Salomon, dan Papua Nugini untuk ikut menyuarakan kemerdekaan bagi Papua.³⁶

Hasil dari deklarasi tersebut adalah terkumpulnya 1,8 juta tanda tangan yang menyetujui Papua merdeka. Selanjutnya, petisi tersebut diserahkan kepada Dewan Dekolonisasi PBB sebagai persetujuan untuk dijadikan isu. Namun, hal ini mendapat penolakan baik oleh PBB dan Indonesia. Tidak berhenti pada keadaan tersebut, menyuarakan HAM Papua terus dilakukan oleh negara-negara Kawasan Pasifik Selatan berturut-turut setelah pengajuan tersebut hingga yang terakhir dilakukan pada tahun 2018 melalui negara Vanuatu.

Selain itu, bantuan negara-negara Pasifik Selatan juga dapat dilihat melalui perijinan dibangunnya kantor perwakilan ULMWP di negara-negara tersebut, seperti Papua Nugini, Vanuatu, Fiji, hingga Kepulauan Salomon. Meskipun beberapa negara sudah menyatakan posisinya mereka yang cenderung mendukung Indonesia seperti Papua Nugini dan Fiji, namun tidak dapat dipungkiri bahwa beberapa oknum yang menjadi bagian dari negara tersebut tetap menyatakan dukungan terhadap kemerdekaan Papua sebagai bentuk solidaritas Ras Melanesia.

³⁶ Ibrahim Peyon, “Perjalanan Benny Wenda dari Penjara Abepura ke Internasional: Lobi Internasional (Bagian 4)”, Suara Papua, 2018, dalam <http://suarapapua.com/2018/06/02/perjalanan-benny-wenda-dari-penjara-abepura-ke-internasional-lobi-internasional-bagian-4-habis/>. Diakses pada 27 Desember 2018.

4.2.2 Strategi Diplomasi Pertahanan Indonesia dalam Merespon Isu Internasionalisasi Separatisme Papua

1. Ends

Salah satu yang menjadi prioritas kepentingan nasional Indonesia adalah tercapainya kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Prinsip ini telah tertanam kepada setiap warga negara Indonesia sejak kecil melalui pembacaan pembukaan UUD RI 1945 ataupun pelajaran kewarganegaraan pada setiap jenjang pendidikan. Hal ini juga berlaku hingga bagaimana sikap setiap warga negara terhadap isu-isu ataupun konflik yang mengancam kedaulatan Indonesia.

Kemerdekaan Papua yang mengacu pada lepasnya Provinsi Papua akan menjadi salah satu penyebab pudarnya kedaulatan Indonesia. Sehingga, pemerintah Indonesia berusaha untuk mempertahankan Papua sama seperti yang telah dilakukan oleh Indonesia pada saat perang gerilya merebut Irian Barat tahun 1962. Berikut ini adalah beberapa hal yang ingin dicapai dalam pencapaian strategi diplomasi Pertahanan Indonesia dalam merespon isu internasionalisasi separatisme Papua.

- a. Tercapainya Rekonsiliasi Domestik dengan Masyarakat Papua Untuk Memperkuat Kedaulatan NKRI

Kilas balik sejarah yang menjadi pemicu adanya internasionalisasi separatisme Papua adalah trauma berkepanjangan dari masyarakat Papua terhadap kekerasan yang dilakukan terutama pada saat Operasi KOTEKA yang mengacu pada pelanggaran HAM terhadap OAP. Kondisi psikis ini tidak dapat diobati melalui pengembangan politik ataupun ekonomi melainkan pendekatan sosial dan psikologi seperti yang diutarakan oleh Asisten Deputi Koordinasi Otonomi Khusus dari KEMENKO POLHUKAM,

“Pendekatan yang harus menjadi perhatian semua pihak adalah kita lebih banyak pendekatan formal dalam konteks manajemen. Militer dalam konteks kepemimpinan. Faktor non-struktural juga

menjadi pertimbangan seperti moril, psikologi. Perlu ada pendekatan dilengkapi dengan pembenahan diri”³⁷

Disebutkan bahwa pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah adalah secara formal dan hal ini tidak dapat dipungkiri terkait dengan implementasi kebijakan *nawacita* yakni pembangunan Indonesia Timur lebih diutamakan pada pembangunan infrastruktur. Namun, pembangunan secara sosial dan psikis setiap masyarakat OAP perlu untuk dibimbing demi memupuk nasionalisme terhadap NKRI. Hal ini juga diperkuat oleh pernyataan yang diajukan oleh Adriana Elisabeth, Kepala Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, yakni

“Isu yang terkait separatisme bahwa hal itu ada di pegunungan tengah. Di tempat lain, orientasinya sudah berubah. Tetapi disisi lain, ada isu lain yang sudah berkorelasi dengan sumber daya alam. Pihak-pihak yang harus berembuk adalah pihak didalam sendiri. Harus ada yang menjadi inisiatif utama dalam penyelesaian hal tersebut. Artinya, bagaimana mau menyelesaikan isu internasionalisasi jika kasus yang terjadi di daerah itu sendiri.”³⁸

Pernyataan ini menjelaskan bahwa salah satu yang menjadi keunggulan Papua adalah sumber daya alam yang melimpah, baik hasil bumi maupun hasil penambangan. Sehingga, mempengaruhi taraf kehidupan OAP yang menggantungkan nasib mereka kepada kekayaan alam yang dimiliki. Hal ini mengacu pada rendahnya tingkat modernisasi yang dialami oleh OAP terutama yang berada di Pegunungan Tengah. Isu separatisme Papua yang berawal dari permasalahan domestik mengakar hingga pada akhirnya diajukan pada negara-negara lain untuk mengajukan menjadi target bagi Indonesia untuk meredam gerakan tersebut sesuai dengan prinsip yang dianut oleh Indonesia sejak awal, yakni demokrasi.

- b. Berkembangnya Hubungan Kerjasama Bilateral dan Multilateral antara Indonesia dan negara-negara Kawasan Pasifik Selatan

³⁷ Wawancara dengan Asisten Deputi Koordinasi Otonomi Khusus, *op.cit.*

³⁸ Wawancara dengan Kepala Pusat Penelitian Politik, *op.cit.*

Konsep internasionalisasi yang dilakukan oleh para aktivis separatisme Papua dapat dikatakan langkah yang berani untuk dilakukan demi mencapai keberhasilan tujuan mereka. Para aktivis merambah dunia politik dan bernegosiasi dengan para petinggi dari negara lain untuk mendapatkan dukungan secara internasional. Oleh karena itu, salah satu pencapaian yang ingin dicapai Indonesia adalah melakukan gerakan diplomasi yang selangkah lebih maju dibandingkan para aktivis. Diplomasi pertahanan adalah salah satu implementasi diplomasi total yang dicanangkan oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Rossy Verona selaku Sekretaris Direktorat Asia Pasifik dan Afrika, yakni

“Selama ini upaya yang dilakukan oleh KEMLU adalah melakukan diplomasi total terutama kepada negara-negara Pasifik Selatan yang selama ini vokal terhadap isu separatisme Papua ini. Segala hal yang mereka butuhkan kami berikan selama masih dalam jangkauan kami. Kami tunjukkan bentuk partisipasi kami dalam menghargai dan ingin bergabung dalam proses pembangunan negara-negara kawasan pasifik Selatan”³⁹

Tentu pencapaian ini akan dikategorikan berhasil jika diplomasi yang dilakukan berhasil mencapai seluruh negara kawasan Pasifik Selatan. Hal ini yang perlu untuk dianalisa lebih mendalam sehingga solusi dapat ditemukan dibalik segala kesulitan dalam menjangkau negara-negara tersebut. Hal ini tentu saja untuk menghindari adanya ancaman tradisional yang dapat mengganggu stabilitas regionalisasi negara-negara Pasifik Selatan serta kedaulatan Indonesia.

Diplomasi pertahanan yang diharapkan tentu berdasar pada konsep strategic engagement dimana hubungan militer kedua negara didiplomasikan dalam bentuk kerjasama yang strategis. Artinya, dalam mencapai sistem pertahanan yang terpadu pada setiap negara, diperlukan kerjasama dalam menjaga wilayah kedaulatan masing-masing dan diutamakan pada penjagaan wilayah garis batas antar negara. Hal ini

³⁹ Rossy Verona, “Diplomasi Pertahanan Indonesia Terhadap Negara-Negara di Kawasan Pasifik Papua”, pada Focus Group Discussion Prodi Diplomasi Pertahanan di Universitas Pertahanan Indonesia, tanggal 31 Juli 2018.

sebagaimana dilakukan untuk mencapai kedaulatan negara dengan mengacu pada integritas regional.

Konteks pertahanan yang ingin dicapai adalah Indonesia mewujudkan bentuk kerjasama pertahanan dengan melakukan berbagai kegiatan yang dapat menciptakan CBM (Confidence Building Measures) baik Indonesia dan negara-negara Kawasan Pasifik Selatan. Pencapaian strategic engagement adalah peningkatan kapabilitas personil militer maupun alutsista. Hal ini dapat terwujud melalui pelatihan personil militer, program pertukaran pasukan militer, ataupun kunjungan kapal negara.

2. Means

Pencapaian strategi tentu dibutuhkan media atau perantara dalam menemukan benang merah. Terkait dengan isu internasionalisasi separatisme Papua juga dibutuhkan media tersebut untuk mencapai tujuan Indonesia, bukan hanya meredam isu internasionalisasi separatisme Papua namun juga dalam merangkul hubungan kerjasama yang lebih baik dengan negara-negara Pasifik Selatan khususnya.

a. Kementerian dan Lembaga yang Berhubungan Langsung dengan Isu Internasionalisasi Separatisme Papua

Seperti yang telah diungkap oleh Ibu Adriana Elisabeth sebagai akademisi bahwa penyelesaian isu separatisme Papua harus diselesaikan dari wilayahnya dulu untuk memperkecil kemungkinan dibawa pada sistem internasional. Dalam hal ini, merupakan peran setiap jajaran pemerintah dan masyarakat Papua untuk bekerja sama dalam menangani isu tersebut. Namun, bukanlah perkara yang mudah untuk melakukan hal tersebut. Trust Building process yang dilakukan pemerintah Indonesia melalui penerapan kebijakan Nawacita belum mencukupi jika masih dalam skala infrastruktur. Selain itu, sinergi antar Kementerian dan Lembaga juga perlu adanya pemahaman bersama dengan satu tujuan untuk membangun Papua serta meyakinkan negara-negara lain bahwa Papua

adalah bagian dari Indonesia. Hal ini seperti pernyataan dari Emir Chairullah seorang Jurnalis Media Indonesia yakni,

“Ekonomi pada kasus Papua tidak dapat dikatakan sebagai prioritas utama penyelesaian. Pembangunan infrastruktur sudah sangat efektif namun tidak menjamin bahwa hal tersebut adalah satu-satunya yang dibutuhkan. Ideologinya OAP adalah kehidupan kolektif, jadi perlu adanya turun tangan pemerintah daerah dan pusat.”⁴⁰

Dari pernyataan diatas, yang perlu digarisbawahi adalah koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam menanggapi isu separatisme Papua. Perlu adanya kesepahaman bersama. Terkait kebijakan Otonomi khusus juga harus ada kejelasan dalam bagaimana titik tengah untuk kebijakan tersebut. Seperti pernyataan oleh Asisten Deputi Koordinasi Otonomi Khusus KEMENKO POLHUKAM

“Kebijakan iya tentu dari pusat. Implementasi dalam konsep manajemen modern, dimana ada program ada uang, ada SDM, sistem, anggaran, itu dulu yang dicek. Kalo semuanya sudah baru dianalisa kebijakan mana yang salah. Ini bukan membenarkan pemerintah pusat.”⁴¹

Dalam menganalisa kebijakan otonomi khusus sudah diberikan sebelumnya bahwa terjadi anomali dari sejak awal dicanangkan. Namun, ini yang kemudian menjadi salah satu bagian yang harus dianalisa lebih mendalam melalui pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagai pelaksana otonomi khusus. Selain itu, Kementerian Pertahanan bersama dengan TNI berperan sangat penting dalam meningkatkan skema diplomasi pertahanan Indonesia dengan negara-negara kawasan Pasifik Selatan. Pada akhirnya pertahanan Indonesia berbanding lurus dengan kedaulatan negara sehingga hal ini menjadi prioritas dalam mempertahankan keutuhan wilayah.

Salah satu peran nyata Kementerian Pertahanan adalah mengadakan rapat tertutup dengan TNI dan Komisi I DPR dimana salah satu isu yang dibahas adalah kemerdekaan Papua. Proses

⁴⁰ Wawancara dengan Jurnalis Media Indonesia, *op.cit.*

⁴¹ Wawancara dengan Asisten Deputi Koordinasi Otonomi Khusus, *op.cit.*

internasionalisasi yang dilakukan oleh para separatis dinilai dapat merusak image Indonesia yang sudah dibangun di hadapan negara lainnya.⁴² Dalam rapat koordinasi tertutup tersebut, Menhan RI beserta TNI menyatukan suara dalam mengatasi isu separatisme di Papua. Salah satunya dengan koordinasi antar Kementerian dan Lembaga untuk memperkuat pertahanan pada daerah perbatasan.

b. Organisasi Internasional yang Mewadahi Indonesia dan Negara-Negara Kawasan Pasifik Selatan

Hubungan kerjasama internasional yang dijalin oleh antar negara pada dasarnya mengacu pada satu alasan yakni untuk memenuhi apa yang menjadi kekurangan dari negara tersebut dan dapat diperoleh di negara lain. Hubungan saling menguntungkan diperlukan dalam mewujudkan kepentingan nasional dan kepentingan bersama. Hal ini juga dilakukan oleh Indonesia sebagaimana layaknya negara berkembang yang menjalin kerjasama internasional dengan negara-negara maju. Terkait dengan isu internasionalisasi separatisme Papua, Indonesia dihadapkan dengan negara-negara yang secara global masuk dalam indeks negara miskin, namun memiliki peran yang krusial dalam menyebarkan isu separatisme Papua dengan dasar negara tetangga yang memiliki persamaan ras. Hal ini juga sebagaimana diungkap oleh Kepala Sub Direktorat Asia Timur dan Pasifik Arif Gunawan yakni,

“Selama ini Indonesia fokus politik luar negeri lebih ke negara tradisional seperti Jepang, Korea, Eropa, negara-negara yang dianggap dibutuhkan untuk pembangunan ekonomi. Dalam pembangunan dibutuhkan negara-negara yang memiliki potensi membantu Indonesia dalam proses pembangunan. Politik seperti ini Indonesia melupakan negara-negara yang berada pada latar belakang kita. Akhirnya negara-negara ini karena kurang interaksi yang begitu intens. Dimanfaatkan oleh separatis dan digalang oleh

⁴² Kristian Erdianto. “DPR, KEMHAN, dan TNI Bahas Isu Terorisme Hingga OPM Saat Rapat Kerja”, dalam <https://nasional.kompas.com/read/2018/01/29/20375061/dpr-kemhan-dan-tni-bahas-isu-terorisme-hingga-opm-saat-rapat-kerja>, diakses pada 1 Februari 2019.

kelompok separatis sebagai staging point untuk menyuarakan pandangan politik mereka.”⁴³

Hal ini yang akhirnya menjadi *warning signal* bagi Indonesia untuk menjalin kerjasama yang intens dengan negara-negara kawasan Pasifik Selatan, terutama jika posisi Indonesia yang menjadi anggota G-20. Salah satu media yang dapat digunakan untuk menjalin kedekatan dengan negara-negara Pasifik Selatan adalah melalui organisasi regional yang berada pada kawasan tersebut.

Perlu diketahui bahwa dalam penjelasan sebelumnya dijelaskan bahwa partisipasi dari negara-negara kawasan Pasifik Selatan dimulai ketika isu separatisme Papua dijadikan sebagai salah satu objek politik internasional oleh organisasi regional negara-negara Kawasan Pasifik Selatan yaitu Melanesian Spearhead Group (MSG). Indonesia dalam merespon forum yang diadakan oleh negara-negara Kawasan Pasifik Selatan mencoba untuk menjadi bagian dari MSG dengan mengajukan diri sebagai anggota. Hal ini mendapat respon pro dan kontra dari negara-negara pasifik Selatan. Sebagian besar anggota bersikeras untuk tidak menetapkan Indonesia sebagai anggota karena dianggap sebagai penjajah Papua. Di sisi lain, Fiji yang menyatakan dukungan terhadap Indonesia berusaha menetapkan posisi Indonesia dengan menetapkan Indonesia sebagai status pemantau (Observer). Hal ini sebagai salah satu strategi Indonesia dalam meredam penyebaran isu separatisme di Papua agar tidak semakin lebar.⁴⁴

Selain itu Brigjen TNI Saptono Adji yang merupakan Deputi B Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI mengemukakan bahwa, “Dalam konteks negara-negara MSG kita menjadi associate member, kemudian disatu sisi kita tetap menggabungkan ULMWP, di PIF negara besar yang tergabung adalah Australia dan Selandia Baru, negara ini yang cukup

⁴³ Wawancara dengan Kepala Sub Direktorat-5 Asia Timur dan Pasifik Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri, pada 9 Oktober 2018.

⁴⁴ Dateline Pacific. “Does Indonesia Belong in the Melanesian Spearhead Groups?”, dalam <https://www.radionz.co.nz/international/programmes/datelinepacific/audio/2018637598/does-indonesia-belong-in-the-melanesian-spearhead-group>, diakses pada 26 Desember 2018.

dominan pada negara-negara MSG. Negara anggota MSG sebagian yang menjadi anggota PIF.”⁴⁵ Hal ini menjadi peluang bagi Indonesia dalam mengumpulkan dukungan untuk menghentikan penyebaran isu separatisme Papua di negara-negara Kawasan Pasifik Selatan.

Dinamika internasional mendorong kompetisi yang besar sehingga pengaruh Australia mulai terancam di hadapan negara-negara Kawasan Pasifik Selatan dengan kehadiran China. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Kepala Sub Direktorat Multilateral Kementerian Pertahanan yakni,

“Ekonomi Australia sudah didrive oleh China. Disini sudah bias hubungan Australia terhadap China. Australia terancam dengan posisi China di Vanuatu. Karena pinjaman uang China terhadap Vanuatu sangat besar sehingga mengiyakan untuk adanya pangkalan Aju dri kapal perang China di Vanuatu sehingga memaksa Australia membayar mahal untuk mencegah hal tersebut di Vanuatu karena China sudah menginjakkan kakinya di Sri Lanka.”⁴⁶

Hal ini juga memicu Indonesia untuk melihat sejauh mana kekuatan PIF (Pacific Islands Forum) dalam genggamannya Australia untuk dapat dijadikan pegangan.

3. Ways

Penyusunan strategi tidak terlepas dari langkah-langkah atau proses yang disusun demi tercapainya tujuan tersebut. Indonesia tentu membutuhkan cara-cara yang dianggap efisien dalam menangani isu separatisme Papua.

a. Menyelenggarakan Dialog Terbuka Secara Nasional dengan Masyarakat Papua

Berbicara tentang dialog, pada dasarnya adalah komunikasi dua arah yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan atas permasalahan yang dibahas. Hal ini dinilai sangat efektif dalam mencapai persetujuan

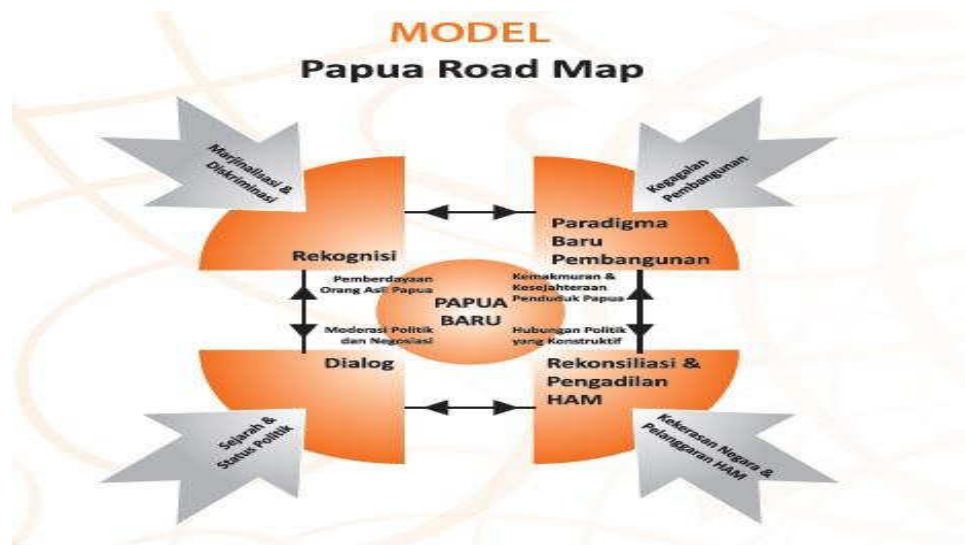
⁴⁵ Brigjen Saptono Adji, “Diplomasi Pertahanan Indonesia Terhadap Negara-Negara di Kawasan Pasifik Papua”, pada Focus Group Discussion Prodi Diplomasi Pertahanan di Universitas Pertahanan Indonesia, tanggal 31 Juli 2018.

⁴⁶ Wawancara dengan Kepala Sub Direktorat Multilateral, *op.cit*

dengan konsiderasi dari pihak-pihak yang berpartisipasi dalam dialog tersebut.

Hal ini berlaku juga dengan dialog nasional untuk kepentingan masyarakat Papua. Konflik separatisme Papua merupakan bentuk konflik domestik yang kemudian menyebar pada dunia internasional karena kaum separatis tidak mendapatkan respon yang diharapkan di Indonesia. Keamanan nasional yang merupakan bagian dari perwujudan pertahanan negara dan hal ini yang masih menjadi polemik di Papua. Oleh karena itu, perlu adanya perbaikan hubungan yang baik antara OAP dan TNI serta Polri dalam upaya menjaga situasi damai di Papua.

Namun, dialog tersebut pada umumnya tidak dilakukan secara mendalam dan masih sebatas formalitas. Dalam resolusi penyelesaian Papua yang diajukan oleh LIPI dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Gambar 4.5 Resolusi Penyelesaian Isu Papua

Sumber: "Papua Road Map", 2008. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

Salah satu yang menjadi acuan adalah dialog dari keempat solusi yang ditawarkan. Hal ini sebagai bentuk pendekatan psikologis kepada masyarakat Papua terkait penyelesaian trauma sejarah.

“Sejarah, dari kaca mata pemerintah mereka merasa insecure bahwa hal itu sudah final dan tidak perlu dibicarakan lagi. Sedangkan dari pandangan LIPI bahwa secara akademik bisa diselesaikan. Dari seluruh isu tersebut, ada satu jalan yang membuka papua ke arah pembangunan yang lebih menggambarkan karakteristik papua yakni dengan mengadakan dialog. Budaya papua adalah budaya bertutur. Skema dialog yang bisa dicoba.”⁴⁷

Salah satu hal yang tidak dapat disangkal adalah peluang Papua memerdekakan diri dari Indonesia dikarenakan para aktivis yang berada di luar negeri selalu mendapat dukungan dari masyarakat Papua yang masih berada di Indonesia. Hal ini yang kemudian dapat dijadikan peluang untuk melakukan proses pendekatan kembali, bukan hanya dari segi pendekatan ekonomi dan pembangunan infrastruktur melainkan juga pendekatan sosial terhadap OAP.

Pendekatan sejarah adalah cenderung susah dilakukan namun hal ini juga yang selalu diungkit oleh masyarakat Papua tentang begitu banyak pelanggaran HAM pada masa lampau yang belum diselesaikan hingga sekarang. Hal ini juga yang dianggap pemerintah bahwa masalah yang lampau tidak dapat dikaitkan secara langsung, terutama ketika pihak pemerintah telah mengupayakan pembangunan yang merata.⁴⁸ Namun, isu pelanggaran HAM justru menjadi senjata bagi negara-negara Pasifik Selatan menyerang Indonesia pada sidang PBB.

b. Meningkatkan Diplomasi Pertahanan Indonesia dan negara-negara Kawasan Pasifik Selatan

Salah satu kelebihan yang dimiliki oleh aktivis separatis Papua adalah kemampuan mereka dalam mencari dukungan melalui kunjungan politik ke negara-negara. Kapabilitas tersebut bisa membuka kemungkinan bagi isu tersebut untuk diajukan dalam Dewan 24 Dekolonisasi PBB. Dalam perjalanan perjuangan aktivis separatis memperjuangkan isu mereka dibahas dalam sidang PBB melalui negara-

⁴⁷ Wawancara dengan Kepala Pusat Penelitian Politik, *op.cit.*

⁴⁸ Brigjen Saptono Adji, *op.cit.*

negara kawasan Pasifik Selatan, Indonesia telah merespon sebanyak tiga kali terhitung dari tahun 2016, 2017, dan yang terakhir pada tahun 2018. Sidang terakhir yang dihadiri oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Jusuf Kalla mengajukan hak *Right to Reply* untuk merespon negara Vanuatu yang menyebut tentang pelanggaran HAM di Papua agar menjadi perhatian dunia.

“Right to reply disampaikan oleh Indonesia untuk menyanggah respon dari negara lain. Informasinya sifatnya sepihak. Dari Indonesia sudah mengundang dewan HAM PBB ke Indonesia untuk melihat secara langsung dan menganalisa pihak-pihak yang berseberangan dengan Indonesia. Indonesia merespon dengan perbaikan yang ada.”⁴⁹

Pernyataan yang disampaikan oleh Kepala Sub Direktorat Asia Timur dan Pasifik adalah sebagai bentuk respon bahwa pernyataan Vanuatu tidak dapat dibuktikan dengan hal-hal yang menunjukkan kebenaran tersebut. Respon ini dianggap oleh KEMLU sebagai hasil diplomasi Indonesia di mata PBB bahwa isu separatisme Papua tidak patut untuk disebut oleh negara lain dalam sidang PBB.

Namun, ada hal menarik yang berseberangan dengan pernyataan tersebut yang dikeluarkan oleh Ibu Adriana Elisabeth dari Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI bidang Politik Internasional yang mengemukakan bahwa, “Wapres dalam sidang PBB bersifat reaktif terhadap Vanuatu. Kita harus lebih *smart* dalam merespon yakni Indonesia serius dalam penyelesaian masalah HAM di Papua. Juga menyelenggarakan *democratic police*. Hal tersebut harus diceritakan.”⁵⁰

Hal ini berlawanan dengan apa yang selama ini menjadi respon para diplomat dalam menanggapi isu pelanggaran HAM di Papua. Tetapi, jika pengakuan tersebut dapat disiasati dapat menjadi salah satu solusi dalam menghentikan isu internasionalisasi separatisme Papua karena pada akhirnya yang dibutuhkan adalah rekognisi oleh pemerintah Indonesia.

⁴⁹ Wawancara dengan Kepala Sub Direktorat-5 Asia Timur dan Pasifik, *op.cit.*

⁵⁰ Wawancara dengan Kepala Pusat Penelitian Politik, *op.cit.*

Disisi lain, dalam mengambil hati negara-negara kawasan Pasifik Selatan salah satunya dengan melakukan *engagement* terhadap negara lain yang memiliki pengaruh terhadap beberapa negara pasifik Selatan seperti pernyataan yang diberikan oleh Kepala Sub Direktorat Multilateral KEMHAN sebagai berikut,

“Dalam kepentingan itu, Indonesia juga bisa *engage* Prancis karena Prancis memiliki suara di Pasifik yang lumayan besar. Di Kaledonia baru, ada beberapa yang dimiliki Prancis.”⁵¹

Hal ini dapat menjadi salah satu cara yang efektif dalam mencapai strategi Indonesia. Disisi lain, Indonesia melalui BAIS TNI telah melakukan kerjasama dengan salah satu negara Pasifik Selatan yakni Fiji dengan mendirikan pos Atase Pertahanan yang bermarkas di Suva.⁵² Hal ini untuk membantu efektivitas dalam membina kerjasama khususnya dalam bidang pertahanan. Selain itu, kerjasama pertahanan maritim juga gencar dilakukan oleh Indonesia dengan negara-negara Pasifik Selatan dengan dasar negara kepulauan. Hal ini ditingkatkan demi menjaga stabilitas keamanan maritim Indonesia dan juga kawasan regional Pasifik Selatan. Hal ini tercermin dalam kerjasama maritim yang dicanangkan oleh KEMLU pada forum PIF September 2018.⁵³

Di sisi lain, Australia menjadi salah satu negara yang memiliki kaitan sangat erat antara Indonesia dan negara-negara kawasan Pasifik Selatan. Perlu diketahui bahwa sebagian besar negara-negara Kawasan Pasifik Selatan membutuhkan Australia sebagai salah satu negara dengan kapasitas militer yang canggih serta berada pada teritori yang paling dekat dengan kawasan tersebut. Hubungan bilateral Indonesia dan Australia pun makin erat dalam berbagai bidang. Terkait konteks pertahanan, Kementerian Pertahanan Indonesia sering melakukan pertemuan bilateral

⁵¹ Wawancara dengan Kepala Sub Direktorat Multilateral, *op.cit*

⁵² Brigjen Saptono Adji, *op.cit*.

⁵³ Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, “Indonesia Perkuat Kerjasama Maritim dengan Pasifik”, dalam <https://www.kemlu.go.id/id/berita/Pages/Indonesia-Perkuat-Kerja-Sama-Kemaritiman-dengan-Negara-Pasifik-pada-KTT-PIF-ke-49-di-Nauru.aspx>, diakses pada 28 Desember 2018.

dengan Kementerian Pertahanan Australia setiap tahun dimulai pada tahun 2012.⁵⁴

Pertemuan tahunan antara MENHAN Indonesia dan MENHAN Australia adalah bentuk peningkatan kerjasama bilateral antar kedua negara tersebut dalam menghadapi ancaman yang mengancam teritori kedua negara tersebut. Bentuk kerjasama awal yang terbentuk adalah pada keamanan maritim, terorisme, serta peningkatan industri teknologi pertahanan. Pertemuan rutin ini kemudian berkembang pada isu pertahanan negara Indonesia, salah satunya adalah pengakuan kedaulatan Indonesia terkait internasionalisasi separatisme Papua. Seperti yang terjadi pada tahun 2017, MENHAN Indonesia, Ryamizzard Ryacuddu menghadiri pertemuan bilateral tahunan dengan MENHAN Australia, Marise Paynes di Sidney, pada 16 Maret 2017.⁵⁵

Selain membahas tentang kerjasama maritim Indonesia dan Australia serta industri pertahanan, Indonesia juga menghimbau peran Australia dalam mengajak negara kawasan Pasifik Selatan untuk menghentikan pengangkatan isu Papua Merdeka serta mengakui kedaulatan Indonesia. Kerjasama ini juga kemudian dikembangkan melalui Kerjasama Kelompok Kerja Operasi Pemeliharaan Perdamaian periode tahun 2017-2020. Respon balik yang diberikan Australia tergambar pada kunjungan Panglima Angkatan Bersenjata Australia General Angus Campbell, AO, DSC., kepada Menteri Pertahanan Indonesia, Ryamizard Ryacuddu di Kementerian Pertahanan pada 20 Februari 2019.⁵⁶ Pangab Australia menyatakan dukungan penuh mendukung kedaulatan Indonesia dan tidak akan ikut campur dalam masalah separatisme Papua. Disisi lain, Pangab Australia menyatakan

⁵⁴ IKAHAN, "Pertemuan Menteri Pertahanan Tahunan yang Perdana", dalam <http://ikahan.com/2012/10/pertemuan-menteri-pertahanan-tahunan-yang-perdana/>, diakses pada 20 Februari 2019.

⁵⁵ Bona Ventura, "Ryamizard Ryacuddu Bertemu MENHAN Australia Bahas Pertahanan", dalam <https://nasional.sindonews.com/read/1189060/14/ryamizard-ryacudu-bertemu-menhan-australia-bahas-pertahanan-1489675510>, diakses pada 19 Februari 2019.

⁵⁶ Kementerian Pertahanan Indonesia, "Diterima MENHAN RI, Pangab Australia

peningkatan kerjasama antar angkatan bersenjata, terutama dengan adanya inisiasi pembangunan markas militer Australia di Papua Nugini.

Masih dalam konteks pertahanan, Indonesia saat ini lagi gencar-gencarnya memperkuat hubungan bilateral dengan Fiji. Hal ini terbukti melalui beberapa kerjasama yang dibangun seperti pelatihan *peacekeeping operation*, hingga *exchanges of Naval officers*. Hal ini untuk memperkuat kerjasama pertahanan Indonesia dan Fiji yang sudah terbentuk sejak 1974 namun beberapa tahun terakhir ini mengalami perkembangan yang signifikan.⁵⁷

4.3 Hasil Pembahasan

4.3.1 Perkembangan Isu Internasionalisasi Separatisme Papua

Isu internasionalisasi separatisme Papua yang telah terjadi dalam kurun waktu yang lama dan belum mendapat perhatian khusus pada suatu waktu akan menunjukkan masa klimaks sebagai bentuk protes para aktivis untuk mempercepat proses kemerdekaan Papua. Jika ditinjau dari rentetan peristiwa gerakan separatisme Papua, baik secara domestik maupun internasional telah banyak kasus yang ditemukan. Hal ini secara tidak langsung membuat masyarakat Indonesia menjadi resah dan pada akhirnya kedaulatan Indonesia akan menjadi taruhannya.

Berangkat dari teori kepentingan nasional, Papua memisahkan diri merupakan isu yang mengancam kedaulatan dan dikategorikan sebagai survival mengacu pada pencapaian kedaulatan negara seutuhnya membutuhkan periode waktu yang lama. Bahkan negara maju seperti AS hingga saat ini masih mengalami ancaman yang mengganggu kedaulatan negara tersebut. Bagi Indonesia yang merupakan negara berkembang, kedaulatan dapat diperoleh dengan meningkatkan sistem militer dan memainkan politik luar negeri untuk mendapatkan rekognisi pada dunia

⁵⁷ Prashanth Parameswaran, "What's Next for Indonesia-Fiji Military Ties?", dalam <https://thediplomat.com/2018/08/whats-next-for-indonesia-fiji-military-ties/>, diakses pada 28 Desember 2018.

internasional. Konsep sederhana ini diaplikasikan juga oleh para aktivis separatis Papua dalam mewujudkan keinginan mereka untuk merdeka. Pendekatan yang dilakukan oleh Benny Wenda dan aktivis lainnya di luar negeri adalah untuk mencari dukungan internasional bahwa Papua layak dalam membangun negara sendiri serta kemampuan dalam mengajak negara lain untuk merekognisi Papua dengan segala potensi yang dimiliki.

Hal tersebut akan semakin sulit untuk diatasi oleh Indonesia jika tidak ada gerakan pasti mengenai bagaimana seharusnya langkah-langkah yang harus diambil Indonesia dalam mengatasi perkembangan isu tersebut. Kantor Perwakilan ULMWP telah didirikan di berbagai negara hingga Uni Eropa dan terutama di negara-negara kawasan Pasifik Selatan. Aktivis separatis tersebut menggunakan teknik negosiasi yang bisa dikatakan cukup baik dalam mempengaruhi negara-negara lain untuk memberikan dukungan politik mereka. Dengan adanya pemberian perlindungan suaka politik bagi Benny Wenda oleh Inggris juga menghambat progress pemerintah untuk mengurangi aktivitas demo separatisme Papua di kalangan internasional.

Era globalisasi dan isu internasionalisasi separatisme Papua berada pada jalur yang sama dimana para aktivis mampu untuk melebarkan dukungan dari negara lain, bukan hanya mengacu pada hubungan politik, tetapi juga mengatasnamakan solidaritas bersama dengan mengangkat isu ras, etnis, bahkan kemanusiaan seperti HAM. Negara-negara kawasan Pasifik Selatan selama ini mengangkat isu Papua dengan mendeklarasikan isu pelanggaran HAM yang terjadi di Papua. Meskipun mendapat bantahan, hal ini akan terus dilakukan terkait dengan hak setiap negara yang dapat mengajukan suara di Organisasi internasional PBB.

Kebijakan one state one vote dimanfaatkan oleh aktivis separatis Papua yang berada diluar negeri untuk menguatkan aspirasi mereka. Perlu diketahui bahwa pengajuan petisi referendum kepada dewan dekolonisasi PBB mendapat penolakan karena pengajuan isu

internasional hanya dapat dilakukan oleh negara, bukan dalam konteks komunitas ataupun individu. Itulah sebabnya, peran negara-negara Kawasan Pasifik Selatan memegang peran krusial dalam membawa isu ini pada sidang PBB meski telah mendapat respon balik dari Indonesia.

Tentu saja, aktivis separatis Papua tidak akan berhenti pada tahap itu. Salah satu alasan kuat gabungannya ULMWP kedalam organisasi regional MSG adalah dengan fakta bahwa organisasi tersebut telah mengajukan diri pada sidang PBB sebagai organisasi regional sah yang mewadahi negara-negara kawasan Pasifik Selatan dengan Papua Nugini menjadi ketua saat ini. MSG dinilai dapat menjadi tameng yang kuat bagi ULMWP dalam menyampaikan isu pelanggaran HAM yang selalu diangkat.

Melihat dari peristiwa ini, Indonesia tidak dapat menutup mata tentang isu pelanggaran HAM yang selalu diungkit dengan melakukan penyangkalan bahwa isu tersebut telah terjadi dalam waktu lampau. Indonesia berpatok pada kemajuan pembangunan ekonomi dan infrastruktur yang dilakukan di Papua. Namun, jika isu ini terus menerus diangkat perlu adanya penyelidikan lebih mendalam tentang apa yang melatarbelakangi isu tersebut yang selalu diangkat pada forum internasional. Hal ini dapat diserang balik oleh Indonesia dengan menunjukkan perhatian penuh pemerintah melalui kinerja nyata tanpa perlu menyangkal. Sangkalan ini diasumsikan oleh masyarakat Papua tentang sejarah kelam Papua yang dilupakan.

Kembali pada politisasi isu internasionalisasi separatisme Papua, dukungan yang didapat oleh ULMWP tentu saja bukan hanya dalam bentuk persetujuan referendum ataupun dukungan moril. Para akademis Indonesia meneliti bahwa pemerintah Indonesia perlu untuk menganalisa lebih dalam pemilik dukungan finansial yang memfasilitasi para aktivis tersebut dalam melakukan aktivitasnya di luar negeri. Hal ini terkait dengan trust building issue yang dibangun Indonesia kepada negara-negara lain demi tercapainya kedaulatan pada skala internasional.

Di sisi lain, isu internasionalisasi separatisme Papua sering dilakukan bukan hanya karena dukungan dari dunia internasional, melainkan OAP yang berada di Provinsi Papua juga memegang peran penting dalam menyukseskan gerakan tersebut. Untuk meningkatkan kedaulatan, Indonesia berpedoman bahwa ancaman tidak hanya datang dari luar melainkan negara sendiri juga dapat memberikan ancaman. Hal ini yang kemudian perlu untuk diperhatikan Indonesia dalam memantau gerakan OAP di Papua dan melakukan pendekatan secara intensif kepada masyarakat tersebut.

Secara domestik, kebijakan otonomi khusus melalui teori separatisme dianggap menjadi pemicu utama munculnya pemberontakan untuk memerdekakan diri. Papua yang kaya akan potensi alam belum sebanding dengan potensi sumber daya manusia. Hal ini memicu kesenjangan sosial dalam konteks sosial, pendidikan, hingga menyerempet ke masalah HAM. Masyarakat Papua cenderung membandingkan perkembangan wilayah mereka dengan daerah yang dekat dengan pemerintah pusat, yakni pulau Jawa. Hal ini juga dapat dikatakan menjadi salah satu alasan kuat yang melatarbelakangi motivasi Papua untuk merdeka dengan asumsi bahwa modernisasi dapat mereka ciptakan sendiri bermodalkan potensi sumber daya alam yang dimiliki. Selain itu, faktor budaya juga menjadi isu utamanya meskipun Indonesia sejak lampau selalu mengumandangkan “Bhinneka Tunggal Ika” yakni biar berbeda-beda tetapi tetap satu jua.

Konsep internasionalisasi yang didasari oleh munculnya era globalisasi memicu para aktivis dalam penyebaran isu yang seharusnya menjadi persoalan domestik. Dukungan internasional yang diperoleh Benny Wenda dan aktivis separatis lainnya dilindungi oleh negara-negara kawasan Pasifik Selatan serta beberapa negara maju. Namun, Indonesia yang merupakan bagian dari aktivis HAM PBB sangat menghormati kedaulatan setiap negara dan kebijakan yang tercipta dalam hukum internasional.

Polemik internasionalisasi separatisme Papua menimbulkan dampak bukan hanya antara Indonesia dan Papua, melainkan juga dengan negara-negara yang mendukung separatisme Papua. Vanuatu menyuarkan pelanggaran HAM di Papua melalui sidang PBB berakibat fatal terhadap hubungan Indonesia dan negara-negara kawasan Pasifik. Di sisi lain, Fiji saat ini mengemukakan dukungan penuh terhadap Indonesia sebagai hasil dari kerjasama yang dilakukan Indonesia dan Fiji baik dalam bidang pendidikan, hingga kerjasama pertahanan. Indonesia juga masih mengusahakan pendekatan terhadap negara-negara kawasan Pasifik Selatan lainnya seperti Tuvalu, Kaledonia Baru untuk ikut mendukung kedaulatan Indonesia.

4.3.2 Strategi Diplomasi Pertahanan Indonesia dalam Merespon Isu Internasionalisasi Separatisme Papua

Mencapai kedaulatan negara tentu tidak terlepas dari berkembangnya sistem pertahanan negara. Indonesia dan negara-negara kawasan Pasifik Selatan memiliki kesamaan, yakni negara yang dibatasi oleh laut serta wilayah kedaulatan dalam bentuk kepulauan. Artinya, pertahanan garis batas wilayah harus dikuatkan bukan hanya pada wilayah darat, melainkan air dan juga udara.

Negara-negara Kawasan Pasifik Selatan memiliki kapabilitas militer belum bisa dibandingkan dengan yang dimiliki Indonesia. Sistem pertahanan di negara kawasan tersebut juga masih membutuhkan bantuan dari negara lain, baik dalam menunjang infrastruktur maupun kapasitas personil militer. Peran Australia yang selama ini menjadi dukungan utama bagi negara-negara kawasan Pasifik Selatan juga pada perkembangannya terancam dengan posisi China yang mulai memasuki negara-negara kawasan Pasifik Selatan.

Merupakan peran Indonesia untuk meningkatkan strategi diplomasi pertahanan sebagaimana terkait dengan isu internasionalisasi separatisme Papua yang dilakukan oleh negara-negara kawasan Pasifik

Selatan. Diplomasi pertahanan yang dilakukan Indonesia dilakukan melalui pendekatan *soft power* yang telah diterapkan oleh Gregory Winger berdasar pada konsep eskalasi ancaman yang tidak dapat dicari solusi melalui tindakan koersif. Sehingga, peneliti menemukan beberapa solusi pendekatan diplomasi pertahanan yang terpadu untuk mendukung penyelesaian isu internasionalisasi separatisme Papua.

1. *Conflict Prevention* dengan Kontra Internasionalisasi Separatisme Papua

Pendekatan *soft Power* yang selama ini dilakukan oleh Indonesia tampak nyata melalui pembangunan dalam mengimplementasikan program pemerintah, baik melalui kebijakan otonomi khusus dan Nawacita. Hal ini dapat ditolerir sehubungan dengan pendekatan yang dilakukan Indonesia belum mencapai dukungan penuh terhadap aspek-aspek lainnya diluar ekonomi dan infrastruktur. Selain itu, dalam menangani isu internasionalisasi separatisme Papua perlu adanya pendekatan *soft power* yang lebih menjangkau negara-negara kawasan Pasifik Selatan terutama dengan pendekatan 3 instrumen *soft power* dibawah ini.⁵⁸

a. Agent

Pemerintah dalam menangani isu internasionalisasi separatisme Papua tidak dapat bergerak sendirian. Perlu adanya dukungan aktor-aktor lain yang dapat mendukung sepenuhnya kinerja mereka. Gabungnya Indonesia ke dalam dua organisasi regional negara-negara kawasan Pasifik untuk melakukan pendekatan secara langsung melalui negosiasi. Hal ini juga didukung oleh peran Indonesia yang mampu untuk mewedahi kepentingan negara kawasan Pasifik yang disaat bersamaan juga mencapai kepentingan Indonesia. Selain itu, perlu adanya pendekatan terhadap organisasi non-pemerintah yang bergerak di bidang sosial untuk

⁵⁸ J. Mearsheimer, *The Tragedy of Great Power Politics*, (New York: W.W. Norton, 2001), hlm. 56

menjangkau para aktivis tersebut agar bersedia melakukan negosiasi terhadap isu Papua merdeka.

b. Pillars

Seperti yang telah dianalisa sebelumnya bahwa ekonomi dan infrastruktur tidak dapat menjadi patokan utama dalam menyatukan paham antara Papua dan Indonesia. Perlu adanya pendekatan yang lebih mengacu pada kehidupan sosial. Disisi lain, negara-negara Kawasan Pasifik Selatan yang mendukung Papua dalam konteks kemanusiaan juga perlu untuk dilakukan pendekatan bukan hanya dari kerjasama ekonomi internasional. Pertukaran budaya dan kerjasama peningkatan pariwisata yang saat ini masih dalam proses pengembangan oleh Indonesia dapat dijadikan salah satu senjata untuk meredam penyebaran isu internasionalisasi separatisme Papua. Pendekatan-pendekatan ini akan menghilangkan potensi munculnya ancaman tradisional yang berimbas pada kehidupan sipil kedua belah pihak.

Selain itu, pendekatan ini juga dilakukan terhadap wilayah Papua. Pendekatan pendidikan, sosial, hingga pengembangan SDM OAP juga menjadi penting terkait dengan penyetaraan hak untuk memenuhi kebutuhan hidup tanpa memandang perbedaan ras ataupun etnis. Dalam taraf pendidikan juga masyarakat Papua yang tinggal di daerah terisolasi perlu adanya jangkauan untuk mengedukasi masyarakat dalam memperoleh pendidikan yang layak.

c. Instruments

Kebijakan sebagai hasil dari negosiasi yang dilakukan Indonesia dengan negara-negara kawasan Pasifik Selatan menunjukkan adanya perkembangan. Hal ini memang tidak dapat dilakukan secara instan dan harus dilakukan bertahap. Bentuk kerjasama, partisipasi Indonesia ke dalam organisasi regional kawasan Pasifik merupakan bentuk keseriusan Indonesia dalam menangani isu internasionalisasi separatisme Papua. Hal ini perlu ditingkatkan dan puncaknya adalah melakukan pendekatan

langsung terhadap ULMWP dalam bernegosiasi. Indonesia mempertahankan Papua karena sejak awal Papua adalah bagian dari Indonesia. Hal ini yang menjadi alasan kuat bagi setiap komponen untuk bekerja sama dalam mempertahankan Papua. Oleh karena itu, perlu adanya pertemuan Indonesia dan ULMWP sehingga permasalahan ini bisa diselesaikan secara bertahap tanpa perlu melepaskan Papua.

Selain itu, implementasi kebijakan otonomi khusus yang menjadi instrumen dalam negeri untuk Papua perlu bimbingan lebih lanjut karena polemik yang ditimbulkan, salah satunya adalah menjadi pemicu naiknya keinginan masyarakat Papua untuk merdeka. Kebijakan akan dinilai efektif jika semua sasaran terpenuhi dan dilakukan secara sinergis. Oleh karena itu, Otsus bukan hanya tentang pendanaan ataupun infrastruktur, melainkan juga pembangunan SDM OAP dalam bersaing dengan masyarakat lainnya.

Disisi lain, pertahanan pada dasarnya adalah yang menjadi tujuan utama. Lolosnya Benny Wenda melalui perbatasan Indonesia-PNG menjadi perhatian bagi Indonesia dalam memahami bahwa penjagaan batas wilayah Indonesia perlu ditingkatkan serta sistem pertahanan menjadi lebih terpadu untuk mengawasi setiap gerak di wilayah perbatasan. Konteks diplomasi pertahanan yang ditawarkan oleh Cottey menjadi referensi yang kini diaplikasikan oleh TNI, seperti kerjasama pengiriman Atase Pertahanan ke beberapa negara kawasan Pasifik Selatan seperti yang terjadi di negara Fiji tahun 2018, latihan pasukan perdamaian oleh Indonesia dan negara-negara kawasan Pasifik Selatan seperti PNG dan Fiji, serta pertukaran Naval officers yang dinegosiasikan melalui KEMLU di Nauru. Hal ini merupakan progress dari sistem pertahanan Indonesia yang mengedepankan kerjasama. Terutama jika dikaitkan dengan kondisi geografis Indonesia yang merupakan negara kepulauan sama dengan negara-negara kawasan Pasifik Selatan. Sehingga kerjasama pertahanan ini perlu ditingkatkan pada level yang lebih tinggi.

Proses pengambilan keputusan oleh Indonesia tidak terlepas dari koordinasi yang telah dilakukan sebelumnya dengan pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan dampak dari keputusan tersebut. Dalam tataran sistem demokrasi Indonesia, setiap pihak memiliki hak dalam menyuarakan apa yang diinginkan untuk dapat tercapai. Koordinasi ini merupakan proses yang membutuhkan waktu untuk dapat bersinergis sehingga menghasilkan satu suara.

Penyelesaian isu separatisme Papua tidak terlepas dari sinergi antar kementerian dan lembaga untuk mewujudkan keputusan-keputusan yang memberi dampak pada penanganan isu tersebut. Ada 2 jenis koordinasi yang dilakukan Indonesia⁵⁹, yakni:

a. Koordinasi vertikal

Dalam menangani isu internasionalisasi separatisme Papua, Presiden memegang peran yang sangat penting mengingat keterkaitannya dalam konteks internasional. Sehingga, keputusan yang dibuat oleh Presiden harus dilakukan meskipun terkadang koordinasi yang dilakukan oleh kementerian dan jajarannya tidak dapat dilakukan secara efektif. Seperti contoh, pengiriman menteri Wiranto dari KEMENKO POLHUKAM ke negara-negara kawasan Pasifik Selatan oleh presiden terkait dengan konsiderasi bahwa adanya intensi keamanan yang terganggu dan output yang dihasilkan akan berbeda jika KEMLU yang melakukan perjalanan secara urgensi tersebut. Selain itu, peran KEMHAN juga menjadi tolak ukur dalam peningkatan sistem pertahanan negara Indonesia, terutama berkaitan dengan pendekatan diplomasi dengan kekuatan militer asing.

b. Koordinasi Horizontal

Dalam konteks ini, merupakan koordinasi yang hingga saat ini akan selalu dibenahi oleh setiap kementerian dan lembaga. Hal ini dikarenakan

⁵⁹ T. Hani Handoko, Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia, (Yogyakarta: BPFE, 2003), hlm. 36.

belum ada patokan yang absolut dalam menentukan koordinasi kementerian telah berjalan sejauh mana. Seperti contoh, Otonomi Khusus yang merupakan ranah KEMENKO POLHUKAM masih dipertanyakan oleh kalangan akademis karena dianggap belum menjangkau sepenuhnya ke wilayah yang mendapat kebijakan tersebut, terutama Papua. Perlu juga adanya sinergi antara jajaran Kementerian dan pemerintah daerah Papua untuk menunjukkan bahwa kesenjangan sosial dihapuskan dan adanya pembagian persamaan Hak dan Kewajiban kepada setiap warga negara Indonesia.

2. Strategic Engagement

Praktek diplomasi pertahanan yang dilakukan Indonesia terhadap negara-negara kawasan Pasifik Selatan tidak terlepas dari peran Kementerian Pertahanan dan TNI serta kementerian lainnya dalam menunjukkan inisiatif kerjasama pertahanan yang baik di antara negara-negara tersebut. Sebagaimana diungkapkan pada konsep Cottey dan Foster bahwa aspek militer mengalami modernisasi, yakni formasi dalam menjaga pertahanan negara dapat dilakukan melalui hubungan kerjasama yang bertujuan untuk mengecilkan potensi adanya ancaman tradisional.

Kerjasama pertahanan yang dibangun oleh Indonesia dan negara-negara kawasan Pasifik Selatan terhambat dengan adanya konflik baik yang muncul dari dalam wilayah Papua ataupun konflik dari negara lain yang disebabkan oleh isu internasionalisasi separatisme Papua tersebut. Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSB) melakukan aksi penembakan baik di daerah pegunungan dan juga di daerah timika yang merupakan daerah tambang PT. Freeport. Hal ini berpengaruh pada kerjasama yang telah terjalin sebelumnya dengan AS dalam konteks penembakan terhadap pekerja Freeport yang berasal dari negara tersebut.

Di sisi lain, KKSB juga memicu adanya inisiasi dari pemerintah untuk memperkuat sistem pertahanan pada wilayah Papua dengan menambah jumlah personil militer di daerah tersebut. Sehingga, pertahanan Indonesia bisa mencakup baik setiap wilayah di Indonesia juga dalam hubungan pertahanan wilayah batas dengan negara lainnya. Hal-hal yang bisa dilakukan oleh Indonesia berdasar pada konsep diplomasi pertahanan dengan konteks meredam isu internasionalisasi separatisme Papua yakni:

a. Perjanjian Kerjasama Pertahanan secara Bilateral

Negara-negara kawasan Pasifik Selatan dengan cakupan wilayah yang didominasi oleh wilayah laut tidak sebanding dengan sistem pertahanan laut yang dimiliki oleh negara-negara tersebut. Seperti contoh, Papua Nugini meskipun menjadi negara dengan wilayah terluas di antara negara-negara kawasan Pasifik Selatan lainnya masih didukung oleh kekuatan militer dari Australia, bukan hanya dalam konteks personil militer melainkan juga infrastruktur dan alutsista. Sehingga, pertahanan negara Papua Nugini dilakukan dengan mengacu pada sistem yang digunakan oleh Australia.

Sebaliknya, Indonesia dalam menjalin kerjasama pertahanan dengan negara-negara kawasan Pasifik Selatan mengutamakan diplomasi pertahanan secara pragmatis yakni dengan tetap mengacu pada sistem pertahanan yang telah dilakukan dan mendukung aspek-aspek yang masih memiliki kekurangan baik dalam penyediaan maupun dalam pelaksanaan.⁶⁰ Hubungan kerjasama pertahanan Indonesia yang terjalin dengan negara-negara kawasan Pasifik Selatan hingga saat ini masih didominasi dalam bentuk inisiasi. Namun, perlu menjadi pertimbangan bagi Indonesia untuk dapat merealisasikan sebagaimana negara-negara kawasan Pasifik Selatan merupakan negara yang berbatasan langsung dengan Papua dan memiliki sentimental terhadap isu Papua. Salah

⁶⁰ Bhubhindar Singh, See Seng Tan, "From Boots to Brogues: The Rise of Defence Diplomacy in Southeast Asia", *RSIS Monograph*, No. 21, 2011, hlm. 12

satunya, penguatan kerjasama penjagaan wilayah batas antara Indonesia dan Papua Nugini untuk mencegah keluar masuknya masyarakat secara ilegal, juga membatasi ruang gerak para separatis untuk mengakses negara Papua Nugini dalam penyebaran isu internasionalisasi separatisme Papua.

b. Penunjukkan Atase Pertahanan di Negara-Negara Kawasan Pasifik Selatan

Diplomasi setiap negara pada dasarnya dilakukan oleh perwakilan dari Kementerian Luar Negeri. Pada konteks diplomasi pertahanan, Indonesia juga menerapkan sesuai dengan peran TNI yakni diplomasi melalui pengiriman atase pertahanan di setiap negara yang menjalin kerjasama dengan Indonesia. Peran atase pertahanan adalah mendukung pelaksanaan kerjasama pertahanan dengan negara-negara, bukan hanya dalam konteks personil, infrastruktur, ataupun alutsista melainkan juga melalui bentuk-bentuk kontribusi nyata dalam membantu negara tersebut dengan konflik yang dimiliki. Hal ini dilakukan sebatas hubungan kerjasama yang tejalin dengan tetap menghargai setiap negara tersebut.

Hingga saat ini, masih sedikit negara-negara di kawasan Pasifik Selatan yang didirikan pos atase pertahanan dari Indonesia. Seperti contoh penempatan Atase Pertahanan Indonesia untuk Papua Nugini yang juga merangkap untuk Kepulauan Salomon ditempatkan di Port Moresby, Papua Nugini. Selain itu, juga pada tahun 2017 didirikan pos atase pertahanan Indonesia untuk Fiji yang berada di Suva. Kerjasama atase pertahanan ini selain untuk mengawasi gerak dari para separatis juga untuk menjalin kerjasama pertahanan yang baik antara Indonesia dengan negara-negara kawasan Pasifik Selatan.

c. Pertukaran Informasi dan Personil Militer serta Kunjungan Kapal Negara

Indonesia dalam prestasi pasukan perdamaian bukan hanya pada jumlah personil yang banyak, melainkan juga bentuk pengabdian serta

solidaritas yang ditunjukkan. Hal ini yang kemudian dapat menjadi strategi diplomasi pertahanan Indonesia dengan melakukan pertukaran informasi serta personil. Salah satu yang pernah menjadi inisiasi dari TNI adalah latihan personil yang dilakukan oleh pasukan perdamaian Indonesia dengan pasukan yang dimiliki oleh Papua Nugini dan Fiji. Hal ini dengan konsiderasi bahwa negara-negara tersebut memiliki potensi militer yang apabila dikembangkan dapat turut meningkatkan sistem pertahanan negara mereka. Selain itu, kapabilitas pasukan perdamaian yang dimiliki oleh Papua Nugini dan Fiji lumayan besar dibanding negara-negara kawasan Pasifik lainnya.

Selain itu, pertukaran personil militer dalam konteks pertahanan laut juga dilakukan seturut inisiasi yang dilakukan Indonesia melalui Pacific Islands Forum (PIF). Pertukaran personil militer laut akan dilakukan demi menjaga stabilitas wilayah Indonesia dan negara-negara kawasan Pasifik yang merupakan negara-negara kepulauan. Inisiasi ini tentunya jika dikembangkan akan menjadi pemicu bagi negara-negara kawasan Pasifik Selatan lainnya untuk berkontribusi dalam menjaga stabilitas kawasan regional negara tersebut. Hal ini kemudian mengacu pada implementasi kebijakan Indonesia dalam meredam aksi yang dilakukan negara-negara kawasan Pasifik Selatan terkait isu internasionalisasi separatisme Papua.

Disisi lain, Indonesia melakukan peningkatan kerjasama terhadap Australia selain sebagai kekuatan hubungan bilateral, juga sebagai media untuk mendekati negara-negara yang frontal terhadap isu separatisme Papua seperti Vanuatu. Kerjasama ini dilakukan dengan mengadakan kerjasama angkatan perang bersenjata antara Indonesia dan Australia yang diajukan oleh Panglima Angkatan Bersenjata Australia kepada MENHAN Indonesia. Perlu diketahui bahwa Australia menyediakan pasukan militer kepada beberapa negara kawasan Pasifik Selatan, salah satunya adalah Papua Nugini. Hal ini juga bisa dilakukan pendekatan terhadap Vanuatu dan negara-negara kawasan Pasifik Selatan lainnya.

BAB 5

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 Kesimpulan

Dari penelitian tesis yang dilakukan oleh peneliti, disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Perkembangan Isu Internasionalisasi Separatisme Papua
 - a. Menangani isu internasionalisasi separatisme Papua dengan menerapkan diplomasi total bukan hanya berdasar pada diplomasi formal melainkan melakukan pendekatan ke dalam berbagai aspek yang cenderung ke arah non-formal.
 - b. Sinergi baik secara horizontal maupun vertikal perlu untuk ditingkatkan dan koordinasi secara transparan sangat diperlukan dalam membangun sinergitas yang baik, bukan hanya Presiden dan jajaran Kabinet, melainkan juga kepada pemerintah daerah.
2. Strategi Diplomasi Pertahanan Indonesia terhadap Negara-Negara Kawasan Pasifik Selatan
 - a. Perlu dibangun kerjasama pertahanan Indonesia dengan negara-negara kawasan Pasifik Selatan yang lebih baik sehingga kepentingan setiap negara dapat terpenuhi
 - b. Bentuk-bentuk implementasi kerjasama sebagai bentuk diplomasi pertahanan Indonesia perlu untuk dikembangkan sehingga kedaulatan negara yang menjadi tujuan dapat tercapai.

5.2 Rekomendasi

5.2.1 Rekomendasi Teoretis

- a. konsep kedaulatan perlu untuk dibangun kembali kepada setiap masyarakat Papua.

- b. Indonesia dalam mencapai kepentingan nasional perlu untuk mengklasifikasikan setiap isu atau ancaman sehingga solusi yang didapat sesuai objek dan tepat sasaran.
- c. Implementasi soft power oleh pemerintah Indonesia pada negara-negara kawasan Pasifik Selatan perlu untuk dilebarkan ke dalam aspek yang memiliki potensi kerjasama yang menguntungkan.
- d. Kerjasama pertahanan berbasis pada konsep diplomasi pertahanan perlu dilakukan untuk menghindari pemicu munculnya ancaman tradisional.

5.2.2 Rekomendasi Praktis

- a. Tesis ini dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan pemerintah untuk isu internasionalisasi separatisme Papua.
- b. Tesis ini dapat memberi gambaran secara detail tentang perjalanan separatisme Papua, proses internasionalisasi, hingga solusi penyelesaian dari Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur Buku:

- Amirin, Tatang M. 1989. *Menyusun Rencana Penelitian*. Jakarta: Rajawali.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Bahar, Saafroedin. 1996. *Integrasi Nasional: Teori, Masalah, dan Strategi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Buzan, Barry. 1983. *People, States, and Fear: The National Security Problem in International Relations*. United Kingdom: Whealsbeaf Books.
- Cottey A., and Foster A. 2004. *Reshaping Defence Diplomacy: New Roles of Military Cooperation and Assistance*. Oxford: Oxford University Press
- Creswell, John W. 2009. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Method Approaches*. SAGE Publications, Inc.
- Habibie, Bacharuddin Jusuf. 2006. *Detik-Detik yang Menentukan*. Jakarta: THC Mandiri.
- Handoko, T. Hani. 2003. *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: BPFE.
- Hyland, James L. 1995. *Democratic Theory: The Philosophical Foundations*. USA: Manchester University Press.
- Indarti, Poengky, dkk. 2011, *Sekuritisasi Papua*. Jakarta: Imparsial
- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. 2015. *Buku Putih Pertahanan Indonesia*. Jakarta
- Mearsheimer, J. 2001. *The Tragedy of Great Power Politics*. New York: W.W. Norton.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Penerbit PT. Remaja.
- Morgenthau, Hans J. 1961. *Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace*. New York: McGraw Hill.
- Nye, Joseph. 1992. *Soft Power: The Means to Success in World Politics*. New York: Public Affairs,

- Rosenau, James. 2006. *The Study of World Politics: Volume 1*. New York: Routledge.
- Stoner, James A,F., & Charles Wankel. 1986. *Management: Third Edition*. New Jersey: Prentice-Hall International Inc.
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Elfabeta.
- Syamsudin, Nazarudin. 1989. *Integrasi politik di Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Wiersma, William. 1986. *Research Method in Education: An Introduction*. Allyn and Bacon Pub.

Jurnal:

- Deudney, Daniel. 2000. "Geopolitics as Theory: Historical Security Materialism". *European Journal of International Relations*.
- Lowenstein, Allard K. 2008. "Indonesian Human Rights Abuses in West Papua: Application of the Law of Genocide to the History of Indonesian Control. International Human Rights Clinic.
- M. Drew, Dennis and Donald M. Snow. 2006. "Making Twenty-First-Century Strategy". *Maxwell AFB, AL, Air University Press*.
- Rajagopalan, Rajeswari. 2009. "Military Diplomacy: The Need for India to Effectively Use In Its Conduct of Diplomacy". *Library of Congress New Delhi*.
- Singh, Bhubhindar, See Seng Tan. 2011. "From Boots to Brogues: The Rise of Defence Diplomacy in Southeast Asia". *RSIS Monograph No. 21*.
- Siroky, David S., and John Cuffe. 2015. "Lost Autonomy, Nationalism, and Separatism". *Comparative Political Studies*. Volume 48 (I) 3-34.
- United Nations Population Fund Pacific Sub Regional Office, 2008. *"Population and Development profiles: Pacific Island Countries"*. UNFPA: Pacific Islands.

Wagner, Wolfgang. 2006. "Parliamentary Control of Military Mission: Accounting for Pluralism". *Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces: Geneva*.

Winger, Gregory. 2014. "A Theory of Defense Diplomacy". *The Velvet Gauntlet*.

Wilson, E.J, III, 2008. "Hard Power, Soft Power, Smart Power". *The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science*.

Jurnal Online:

Anonim. 2018. "Fiji Country Profile". BBC News, dalam <https://www.bbc.com/news/world-asia-pacific-14919067>, diakses pada 28 Desember 2018.

Dawes, Luke, 2018. "The Pointy End for the Melanesian Spearhead Group". *The Interpreter*, dalam <https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/pointy-end-melanesian-spearhead-group>, diakses pada 28 Desember 2018.

Kominfo. 2016. "2 Tahun Kerja Nyata Jokowi-JK". www.kerjanyaata.id, dalam <https://web.kominfo.go.id/sites/default/files/KSP%202%20Tahun%20Jokowi%20JK.pdf>, diakses pada 28 Desember 2018.

Martinkus, John, and Mark Davis, 2019. "Exclusive: Chemical Weapons Dropped on Papua", *The Saturday Paper*, dalam thesaturdaypaper.com.au. Diakses pada 1 Januari 2019.

Peyon, Ibrahim. 2018. "Perjalanan Benny Wenda: Rekayasa Serangan dan penjara Abepura (Bagian 2)", *Suara Papua*, dalam <http://suarapapua.com/2018/05/26/perjalanan-benny-wenda-rekayasa-serangan-dan-penjara-abepura-bagian-2/>. Diakses pada 27 Desember 2018.

_____. 2018 "Perjalanan Benny Wenda dari Penjara Abepura ke Internasional: Lobi Internasional (Bagian 4)", *Suara Papua*, dalam <http://suarapapua.com/2018/06/02/perjalanan-benny-wenda-dari->

penjara-abepura-ke-internasional-lobi-internasional-bagian-4-habis/. Diakses pada 27 Desember 2018.

Internet/ Website:

Anonim. “*Diplomasi Indonesia Picu Perang Mulut Antara Fiji dan Kep.Salomon*”, dalam <https://www.dw.com/id/diplomasi-indonesia-picu-perang-mulut-antara-fiji-dan-kep-salomon/a-43097730>, diakses pada 26 Desember 2018.

Anonim. “*Konrote Reappointed Fiji’s President*”, dalam <https://www.radionz.co.nz/international/pacific-news/365361/konrote-reappointed-fiji-s-president>, diakses pada 28 Desember 2018.

Anonim, “*Register of All Party Parliamentary Groups*”, dalam <https://publications.parliament.uk/pa/cm/cmllparty/180426/west-papua.htm>. Diakses pada 27 Desember 2018.

Dateline Pacific. “*Does Indonesia Belong in the Melanesian Spearhead Groups?*”, dalam <https://www.radionz.co.nz/international/programmes/datelinepacifi/c/audio/2018637598/does-indonesia-belong-in-the-melanesian-spearhead-group>, diakses pada 26 Desember 2018

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, “*Beranda*”, dalam <https://polkam.go.id/>, diakses pada 28 Desember 2018.

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, “*Struktur Kementerian Luar Negeri*”, dalam <https://www.kemlu.go.id/id/tentang-kemlu/struktur-kemlu/Organization.aspx?kementerianID=2>, diakses pada 28 Desember 2018.

_____ , “*Indonesia Perkuat Kerjasama Maritim dengan Pasifik*”, dalam <https://www.kemlu.go.id/id/berita/Pages/Indonesia-Perkuat-Kerjasama-Kemaritiman-dengan-Negara-Pasifik-pada-KTT-PIF-ke-49-di-Nauru.aspx>, diakses pada 28 Desember 2018.

Prashanth Parameswaran, “*What’s Next for Indonesia-Fiji Military Ties?*”, dalam <https://thediplomat.com/2018/08/whats-next-for-indonesia-fiji-military-ties/>, diakses pada 28 Desember 2018.

Sophie, Foster, and Francis James West. “*Pacific Islands*”, dalam <https://www.britannica.com/place/Pacific-Islands>, diakses pada 26 Desember 2018.

Konstitusi:

Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua

LAMPIRAN I



Foto bersama Asisten Deputi Koordinasi Otonomi Khusus Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Indonesia, **Brigjen TNI Danu Prionggo, S.Sos.**



Foto bersama Kepala Sub Direktorat Asia Timur dan Pasifik-5 Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri Indonesia, **Arif Gunawan**



Foto bersama Peneliti Pusat Penelitian Politik (P2P) Bidang Politik Internasional Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, **Dr. Adriana Elisabeth, M.Soc, Sc.**



Foto bersama Kepala Sub Direktorat Multilateral Direktorat kerjasama Internasional Kementerian Pertahanan Indonesia, **Kolonel Kav. Oktaheroe Ramsi, S.IP., M.Sc.**

LAMPIRAN II



KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
UNIVERSITAS PERTAHANAN

Nomor : B/ 1275 / IX /2018
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan izin penelitian dan
permintaan data

Bogor, 6 September 2018

Kepada
Yth. Pejabat Dalam Lampiran

di
Jakarta

1. Dasar:
 - a. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2011 tentang Universitas Pertahanan sebagai Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah.
 - b. Kalendar Akademik Program Studi Diploması Pertahanan Fakultas Strategi Pertahanan Universitas Pertahanan TA. 2017/2018.
2. Sehubungan dasar di atas, dengan hormat disampaikan bahwa:
 - a. Sebagai persyaratan kelulusan Program Pascasarjana Universitas Pertahanan, bagi mahasiswa diwajibkan menyusun tesis yang terkait dengan bidang program studinya.
 - b. Mahasiswa Program Studi Diploması Pertahanan Fakultas Strategi Pertahanan Unhan atas nama Felani Angela Rosalia Hematang NIM 120170103007, bermaksud menyusun tesis dengan judul: Diploması Pertahanan Indonesia-Kawasan Pasifik Selatan Terkait Internasionalisasi Separatisme Papua Guna Menjaga Kedaulatan Indonesia
3. Berkenaan dengan hal tersebut mohon mahasiswa dimaksud diizinkan untuk melaksanakan penelitian dalam rangka mendapatkan data dan keterangan termasuk melakukan wawancara.
4. Konfirmasi lebih lanjut dapat menghubungi Felani Angela Rosalia Hematang NIM 120170103007, nomor HP. +628114899962, e-mail : felani.hematang@idu.ac.id dan felani.hematang@gmail.com
5. Demikian mohon menjadi periksa.



a.n. Rektor
Universitas Pertahanan
Warek L Bid. Akademik dan Kemahasiswaan,

Prof. Dr. Ir. Dadang Gunawan, M. Eng
Pembina Utama IV/e

Tembusan:

1. Menko Polhukam
2. Menko Perekonomian
3. Menko Pariwisata
4. Ka BIN
5. Ka Bais TNI
6. Dirjen Strahan Kemhan
7. Dirjen Aspasaf Kemlu
8. Rektor Unhan
9. Dirjen Strahan Kemhan
10. Dekan FSP Unhan
11. Karo Aka. dan Kemahasiswaan Unhan.